

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk yang pesat dari waktu ke waktu telah menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia, sehingga kependudukan menjadi penting untuk dikaji. Hal ini mengingat kondisi kependudukan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi dan perencanaan pembangunan khususnya dalam sebuah negara.

Dalam pembahasan mengenai kependudukan ada beberapa aspek yang selalu menjadi bahasan utama yakni mengenai fenomena fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan mobilitas penduduk (perpindahan penduduk). Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari ketiga aspek tersebut (Mantra, 1985:149).

Indonesia secara keseluruhan tingkat pertumbuhannya lebih dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas, karena migrasi neto dapat dikatakan nol (Mantra, 1985:149). Sehingga yang terjadi adalah mobilitas penduduk internal. Mobilitas Penduduk adalah gerak (*movement*) penduduk melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 2000:225-226).

Fenomena mobilitas penduduk di Indonesia sudah sejak lama terjadi, bahkan fenomena mobilitas penduduk telah menjadi semacam budaya. Hal ini terlihat dari adanya budaya merantau pada suku-suku di Indonesia seperti pada suku Minangkabau, Bugis dan Jawa, walaupun istilah yang digunakan di setiap suku berbeda-beda. Budaya merantau adalah budaya di mana seseorang atau biasanya laki-laki meninggalkan kampung atau daerah tempat kelahiran untuk mencari pekerjaan atau penghidupan di luar kampung atau tempat kelahiran, lalu sekali waktu kembali ke daerah tersebut. Merantau ini biasa dilakukan ketika seseorang menginjak dewasa atau dianggap telah memiliki kemampuan yang cukup untuk merantau.

Perkembangan wilayah perkotaan dan industrialisasi di Indonesia semakin membuat pergerakan atau mobilitas penduduk sering terjadi terutama mobilitas penduduk dari desa ke kota yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Hasrat manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik mendorong manusia melakukan mobilitas penduduk termasuk urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perbedaan keadaan sosial, ekonomi serta fasilitas penunjang kehidupan antara desa dan kota memicu terjadinya urbanisasi terutama di wilayah-wilayah kota dan kawasan industri di Indonesia.

Migrasi desa-kota sangat besar dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di desa dan kota karena migrasi dari desa ke kota membuat pasar tenaga kerja di desa bergeser ke kota (ILO, 2004:9). Hal ini disebabkan oleh menyempitnya pekerjaan di desa, adanya keengganan untuk bekerja di sektor pertanian dan harapan akan penghasilan serta penghidupan yang lebih baik di kota.

Ciri khas dari perpindahan penduduk desa-kota ini adalah meningkatnya peran perempuan dalam perpindahan tersebut (ILO, 2004:9). Padahal sebelumnya penduduk laki-laki secara relatif lebih banyak melakukan perpindahan daripada penduduk perempuan (Syafiudin, 1985:59). Dari banyak kajian mengenai migrasi (mobilitas permanen) kecenderungan umum khususnya tentang *out migration* (migrasi keluar) secara historis, dari dulu hingga sekarang, dimanapun dan pada berbagai tipe masyarakat serta sistem kekerabatan, dilakukan oleh laki-laki. Hal ini juga dikemukakan Prawiro (1983:82) bahwa migrasi desa kota atau urbanisasi pada umumnya banyak dilakukan oleh laki-laki dari wanita. Selanjutnya menurut Ravenstein dikatakan bahwa wanita lebih banyak melakukan migrasi (mobilitas penduduk) dibandingkan pria dalam jarak dekat.

Adanya anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga atau urusan domestik seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak sehingga membuat perempuan hanya melakukan aktifitas di rumah. Budaya patriarki di mana laki-laki memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan dan laki-laki lebih mampu memimpin serta menjaga diri yang membuat perempuan dilarang melakukan kegiatan di luar rumah apalagi merantau ke luar daerah tempat tinggalnya.

Fenomena mobilitas penduduk perempuan terdapat juga di Kabupaten Bekasi, dimana banyak perempuan dari luar Kabupaten Bekasi melakukan migrasi ke Kabupaten Bekasi terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan-kawasan industri. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah atau tempat tinggal yang disewakan di

wilayah sekitar pabrik-pabrik yang kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diketahui merupakan salah satu wilayah penyangga dari DKI Jakarta yang termasuk dalam kawasan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Furqon (1998) mengatakan bahwa kegiatan perekonomian kita masih sangat terpusat di Jabotabek. Di kawasan ini peredaran uangnya mencapai 73% dari total peredaran uang nasional. Itu sebabnya pola urbanisasi yang muncul selama ini lebih terkonsentrasi di wilayah ini (Rizal, 2006:252).

Proses pengembangan industri di Bekasi semakin pesat terlebih ketika ada kebijakan pemindahan kawasan industri yang ada di Jakarta ke luar Jakarta. Hal ini terlihat dengan berdirinya sejumlah kawasan industri di Bekasi seperti MM2100, EJIP, JABABEKA, HYUNDAI dan GOBEL. Tentu saja pembangunan kawasan industri ini berpengaruh terhadap kondisi Bekasi yang dahulunya bercorak agraris menjadi industri. Keberadaan industri yang menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk membuat banyak orang dari luar Bekasi bermigrasi ke Bekasi.

Dengan kondisi Bekasi yang mengalami perkembangan industri, seperti telah diungkapkan oleh Prawiro (1983:80) bahwa pendirian industri-industri baru di kota-kota yang berkembang telah banyak menarik tenaga kerja dan buruh untuk melakukan migrasi.

Tabel 1. Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi

No	Nama Kawasan Industri	Luas (Ha)
1	Kawasan Industri Jababeka	790,0
2	Kawasan Industri Jababeka II	250,0
3	Bekasi Fajar Industrial Estate	700,0
4	Megapolis Manunggal Industrial Estate	760,0
5	Lippo City Development	427,4
6	East Jakarta Industri Park (EJIP)	320,0
7	Hyundai Inti Development	200,0
8	Rawa Intan	100,0
9	Patria Manunggal Jaya	90,0
10	Jatiwangi Utara	20,0
11	Gobel Dharma Nusantara	54,0
12	YKK Indonesia Zipper	20,0
13	Kawasan Dharma Industri	18,0
14	Indo Kargomas Persada	230,0
15	Gerbang Teknologi Cikarang	240,0
16	Pura Delta Lestari	2000,0
Total		6.219,4

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2009

Sebagai daerah urban yang memiliki industri menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah tujuan para urban untuk mencari pekerjaan sehingga Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, hal ini terlihat dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang mencapai 3,69 persen pada tahun 2009, dan diperkirakan akan mengalami peningkatan ditahun tahun mendatang. Urbanisasi, LPP yang tinggi berakibat pada tidak terpenuhinya antara kesempatan kerja dibandingkan dengan banyaknya pencari kerja (BPS Kabupaten Bekasi, 2010:42).

Jumlah tenaga kerja yang mencari kerja di Kabupaten Bekasi tahun ke tahun selalu tinggi, hal ini terlihat dari data yang diperoleh BPS dari Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Bekasi seperti pada Tabel 2. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga membuat banyak migran masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2009 dari 752 industri besar sedang terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 213.838 tenaga kerja. Jika dilihat lebih jauh jumlah antara pencari kerja laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

Sassen (1988) dalam Oishi (2002) menjelaskan tentang peran perusahaan multinasional (MNCs) di Negara sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan perekrutan terhadap pekerja wanita, sehingga menimbulkan migrasi atau perpindahan para wanita yang masih muda dan belum menikah yaitu dari daerah pedesaan (*peripheral*) ke daerah perkotaan (*core*) (Purnomo, 2004:19). Jika kita melihat Tabel 3 dan 4 maka kita melihat jumlah dari lowongan pekerjaan dan penempatan kerja, tenaga kerja perempuan lebih banyak penempatan dan lowongannya dibanding tenaga kerja laki-laki.

Fenomena migrasi pada perempuan sangat menarik untuk di kaji, hal ini dikarenakan kajian mengenai migrasi yang dilakukan umumnya lebih banyak berbicara pada domain migrasi yang dilakukan oleh laki-laki untuk mencari nafkah atau penghidupan yang lebih baik bagi dirinya maupun keluarganya. Padahal perempuan dan migrasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sudah sangat lama dilakukan. Chant dan Radcliff (1992) mengatakan bahwa perempuan dan migrasi pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Noer, 2008:6)

Hanya saja kajian mengenai perempuan dan migrasi baru berkembang dengan pesat beberapa dekade yang lalu dengan topik yang sangat bervariasi (Noer, 2008:4).

Tabel 2. Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin 2002-2008

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2005	9.907	7.377	17.284
2006	9.654	7.195	16.849
2007	7.630	5.458	13.088
2008	19.791	18.947	38.738
2009	20.276	18.849	39.125
2010	14.119	15.563	29.682

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (BPS Kab.Bekasi 2011:36)

Tabel 3. Banyaknya Lowongan Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin

Tahun	Lowongan Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2005	1.433	2.141	3.574
2006	1.082	1.139	2.221
2007	4.067	11.771	15.847
2008	2.332	4.368	6.970
2009	2.582	4.337	6919
2010	2.613	3.986	6.599

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (BPS Kab.Bekasi 2011:36)

Fenomena mobilitas penduduk pada tenaga kerja perempuan inilah yang akan dikaji pada penelitian ini yakni pola mobilitas penduduk pada perempuan ke kawasan industri di daerah Bekasi. Permasalahan penelitian difokuskan pada karakteristik tenaga kerja perempuan pelaku mobilitas penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk pada perempuan ke Kabupaten Bekasi dan bagaimana pola mobilitas penduduk. Penelitian ini dilakukan di Bekasi terutama pada

wilayah tempat tinggal perempuan yang melakukan mobilitas penduduk atau kantong-kantong pelaku mobilitas penduduk.

Tabel 4. Banyaknya Penempatan Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin

Tahun	Penempatan Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2005	1.273	2.031	3.304
2006	975	1.055	2.030
2007	1.214	6.834	8.048
2008	708	1.086	2.154
2009	1.174	3.318	4.132
2010	1.505	3.139	4.644

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (BPS Kab.Bekasi 2011:37)

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya masalah yang dapat diidentifikasi sebagai landasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah karakteristik tenaga kerja perempuan yang melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi?
3. Adakah faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk pada perempuan di Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimanakah pola mobilitas penduduk tenaga kerja perempuan ke Kabupaten Bekasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan penelitian dibatasi dan difokuskan pada karakteristik tenaga kerja perempuan yang melakukan mobilitas penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk dan pola mobilitas penduduk tenaga kerja perempuan dari luar wilayah Bekasi ke wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

1.4 Perumusan Masalah

Dari identifikasi dan pembatasan masalah yang ada maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana mobilitas penduduk masuk tenaga kerja perempuan ke wilayah Kabupaten Bekasi?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena mobilitas penduduk perempuan ke wilayah penelitian
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik perempuan pelaku mobilitas penduduk pada di wilayah penelitian
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk pada perempuan di wilayah penelitian
4. Untuk mempelajari pola mobilitas penduduk perempuan di wilayah penelitian

1.6 Definisi Operasional

1. **Mobilitas Penduduk** dalam penelitian ini adalah perpindahan penduduk khususnya perempuan dari luar wilayah Kabupaten Bekasi ke wilayah Kabupaten Bekasi untuk bekerja dan tinggal dengan batas wilayah yang ditetapkan adalah Kabupaten atau Kota.
2. **Tenaga kerja Perempuan** dalam penelitian adalah setiap perempuan yang bekerja di industri yang ada di Kabupaten Bekasi yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi dan tinggal di Kabupaten Bekasi
3. **Pola Mobilitas penduduk** adalah mobilitas penduduk yang terjadi yakni bersifat menetap atau sementara dilihat dari niat dan hubungan dengan daerah asal (kunjungan ke daerah asal).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Hakikat Mobilitas Penduduk

Istilah mobilitas sering digunakan untuk menjelaskan mengenai pergerakan. Mobilitas penduduk memiliki arti pergerakan penduduk. Mobilitas penduduk sendiri terbagi dalam dua macam yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal memiliki pengertian terjadinya perubahan status sosial dari seseorang, contoh dari mobilitas penduduk vertikal adalah kenaikan status pegawai menjadi seorang manager.

Mobilitas penduduk vertikal yang dimaksud di sini menurut Rusli dalam Sorjadi (1992:23) adalah mobilitas yang diambil dari istilah *Population Mobility* atau lebih khusus lagi sama dengan *territorial mobility*, yang mengandung makna gerak penduduk spasial, fisik atau geografis atau horizontal. Mobilitas penduduk geografis adalah gerak (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1978:1). Dilihat dari pengertian tersebut ada dua hal yang dapat digarisbawahi dari pengertian mobilitas penduduk yakni konsep ruang dan waktu.

Mobilitas seperti yang telah diungkapkan diatas memiliki pengertian perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk ini juga terkadang mempunyai pengertian yang sama dengan migrasi. Dalam beberapa studi, pengertian mengenai migrasi dan mobilitas penduduk sering disamaartikan. Pada dasarnya mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk secara geografis. Perbedaan kedua istilah hanya terletak pada permanen dan non permanen (Rizal, 2006:252). Hal ini terjadi akibat dari adanya kesulitan dari para ahli untuk menetapkan definisi dari migrasi sehingga beberapa ahli mengusulkan agar migrasi dianggap bagian dari suatu rangkaian kesatuan yang meliputi semua jenis perpindahan penduduk. Perpindahan-perpindahan ini, yang berkisar dari nglaju sampai pindah tempat tinggal untuk jangka panjang, digambarkan sebagai mobilitas penduduk.

Jika dilihat dari ada atau tidaknya niatan untuk menetap mobilitas penduduk dibagi menjadi dua yakni mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk non permanen. Mobilitas penduduk permanen biasa juga disebut migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah dengan adanya niatan untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk non permanen perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah dengan tidak adanya niatan untuk menetap di daerah tujuan.

2.1.1 Batasan-Batasan dalam Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk sebagaimana pendapat Mantra (1978:1) adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu sehingga ada batasan ruang dan waktu untuk menganalisa mobilitas. Batas wilayah-wilayah yang menjadi dasar dimasukkannya perpindahan dalam migrasi/perpindahan penduduk pertamanya ditetapkan oleh birokrat dan kemudian dirasionalisasikan oleh para peneliti yang ahli ilmu sosial, hal ini sebenarnya tidak dapat diterima (Standing, 1985:3).

Dari perspektif analisa dan kebijakan, cara yang ideal adalah penetapan wilayah dengan mengacu pada variabel-variabel tertentu yang penting dan dapat dianalisa atau berdasarkan ciri-ciri wilayah (Standing, 1985:3). Selanjutnya menurut Standing (1985:3) penetapan melalui ciri-ciri wilayah ini sangat sulit namun dapat digunakan dengan melihat kriteria ekonomi, demografis, budaya bahasa dan politik. Namun terkadang terdapat kesulitan seperti daerah memiliki kesamaan di bidang ekonomi namun berbeda dari segi politik atau budaya.

Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan (dusun) (Mantra, 2000:226). Naim (1979) dalam penelitiannya mengenai mobilitas penduduk

suku Minangkabau menggunakan batas budaya sebagai batas wilayah. Hingga kini belum ada batasan yang jelas menentukan batas wilayah dalam mobilitas penduduk. Badan Pusat Statistik menggunakan batasan propinsi sebagai batasan dalam sensus penduduk untuk migrasi. Mantra (1978) dalam penelitiannya mengenai mobilitas ulang-alik di wilayah Bantul menggunakan batasan dukuh (Mantra, 2000:226).

Perbedaan penetapan dari batasan wilayah ini mengakibatkan hasil penelitian dari tiap peneliti tidak dapat diperbandingkan. Mengingat bahwa skala penelitian itu bervariasi antara yang satu dengan peneliti lain, sulit bagi peneliti mobilitas penduduk untuk menggunakan batas wilayah yang baku (Mantra, 2000:227). Makin kecil batasan wilayah yang digunakan maka makin banyak mobilitas penduduk tersebut terekam.

Selain batasan wilayah dalam mobilitas juga harus diperhitungkan masalah batas waktu atau lamanya seseorang berpindah atau melakukan mobilitas penduduk. Badan Pusat Statistik menggunakan batas waktu enam bulan untuk migrasi. Sehingga seseorang dikatakan melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat lain apabila ia telah menetap selama enam bulan di suatu tempat atau memiliki niatan menetap. Mantra menggunakan batas waktu untuk penelitiannya mengenai mobilitas ulang alik di Bantul (Mantra, 2000:226), dan batas waktu lebih dari satu hari dan kurang dari satu tahun untuk sirkulasi (Kartawinata 1994:12).

Niat untuk menetap dijadikan acuan untuk membedakan apakah seseorang melakukan mobilitas permanen atau mobilitas non-permanen. Steele (1983) dalam Mantra (2000:228) mengatakan apabila seseorang menuju ke daerah lain sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas non permanen walaupun bertempat tinggal cukup lama di daerah tujuan. Contoh yang baik dalam hal ini adalah mobilitas penduduk orang Minang yang dikenal dengan istilah merantau. Mereka walaupun sudah lama tinggal di daerah tujuan namun tidak ada niatan untuk menetap di daerah tersebut.

2.2 Teori-Teori Mobilitas Penduduk

Banyak teori dan model yang berusaha menerangkan fenomena mobilitas penduduk. Dari dahulu hingga sekarang teori-teori mengenai perpindahan penduduk terus dikembangkan. Pada dasarnya teori yang menerangkan mobilitas penduduk menggunakan teori-teori migrasi karena para ahli pada awalnya menggunakan istilah migrasi terlebih dahulu untuk menggambarkan perpindahan penduduk sebelum menggunakan istilah mobilitas penduduk. Teori-teori ini terus berkembang pesat dari mulai abad ke-19 ketika Ravenstein mulai mengungkapkan perilaku migrasi yang terjadi di Inggris dan Eropa. Berikut adalah teori-teori tersebut.

2.2.1 Teori Gravitasi

Peletak dasar teori gravitasi dalam migrasi adalah Ravenstein, yang sering disebut sebagai bapak migrasi. Dari sini berkembang menjadi teori-teori yang lain. Ravenstein pada tahun 1889, telah menguraikan pendapatnya tentang fenomena migrasi yang disusun dalam hukum-hukum migrasi yang terkenal hingga saat ini (Sunarto, 1985:23). Berikut adalah hukum-hukum atau pola migrasi penduduk menurut Ravenstein:

- 1) Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai tujuan
- 2) Faktor yang paling dominan yang memengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal, dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.
- 3) Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang yang ingin bermigrasi
- 4) Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi
- 5) Semakin tinggi pengaruh kekotaan (*urbanished*) terhadap seseorang semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut.
- 6) Semakin tinggi pendapatan seseorang semakin tinggi frekuensi mobilitas orang yang bersangkutan
- 7) Para migran cenderung memilih daerah dimana telah terdapat teman atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.
- 8) Pola migrasi bagi seseorang atau kelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kejadian mendadak seperti bencana alam, peperangan, dan epidemi.
- 9) Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari mereka yang berstatus kawin

- 10) Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan mobilitas daripada yang berpendidikan rendah
- 11) Migrasi tenaga kerja bukan hanya disebabkan oleh tekanan penduduk terhadap lahan, tetapi juga disebabkan oleh tuntutan tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan kerja dan pekerjaan yang lebih baik.

(Saepudin, 2007:16-17), (Sunarto, 1985:23)

Pendapat Ravenstein yang hampir satu abad lalu ternyata sampai sekarang masih relevan. Pada dasarnya teori-teori migrasi yang lain merupakan pengembangan dari hukum Ravenstein (Sunarto, 1985:23).

2.2.2 Teori dorong – tarik

Teori dorong-tarik (*push – pull theory*) diintrodusir oleh Everett S. Lee pada tahun 1966. Menurut Lee, terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu (1) faktor – faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor – faktor pribadi. Faktor – faktor yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan dapat bersifat negatif, positif, maupun netral terhadap migrasi. Faktor positif (+) di daerah asal berarti mempunyai daya dorong terhadap seseorang untuk pergi meninggalkan daerah tersebut, sebaliknya faktor (3) di daerah tujuan berarti mempunyai daya tarik terhadap seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif (-) di daerah asal akan berfungsi sebagai penghambat seseorang untuk pergi ke daerah lain. Begitu pula faktor negatif (-) di daerah tujuan adalah faktor yang

tidak disenangi oleh seseorang, dengan demikian juga akan menghambat masuknya seseorang ke daerah tersebut. Faktor netral (0) pada dasarnya tidak dipengaruhi terhadap seseorang untuk bermigrasi (Sunarto, 1985:22).

Faktor-faktor pendorong migrasi misalnya:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan baku.
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya di pedesaan) akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin (*capital intensive*).
3. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
4. Tidak cocok lagi dengan adat/kepercayaan di tempat asal.
5. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi.
6. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik migrasi antara lain:

1. Adanya rasa superior di tempat yang baru/kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
2. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik
3. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi
4. Kedaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya perumahan, iklim, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.
5. Tarikan dari tempat orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.

6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat hiburan, puast kebudayaan sebgai daya tarik bagi orang-orang dari desaatau kota kecil.

(LDFEUI, 2007:118)

2.2.3 Ehrenberg (2006)

Ehrenberg menjelaskan mengenai fenomena migrasi pada kulit hitam setelah perang dunia ke-1 yang disebabkan oleh permintaan tenaga kerja pada sektor industri di luar wilayah migran dan tingginya tingkat upah di daerah tujuan migran. Menurut Ehrenberg keputusan migrasi ditentukan oleh nilai sekarang (*present value*) dari manfaat bersih migrasi. Selanjutnya Ehrenberg juga menjelaskan, berdasarkan teori *human capital* diprediksi bahwa migrasi mengalir dari wilayah yang relatif miskin ke wilayah dimana pada wilayah tersebut terdapat kesempatan yang lebih baik. Beberapa studi menurutnya menyimpulkan bahwa daya tarik atas kesempatan yang lebih baik di daerah tujuan merupakan faktor yang lebih kuat dibandingkan daya dorong dari daerah asal (misalnya dari daerah miskin yang tercermin dari rendahnya pendapatan). Harapan pendapatan yang lebih tinggi di suatu tempat merupakan daya tarik dari migrasi (Saepudin, 2007:17). Faktor-faktor yang menentukan migrasi menurut Ehrenberg antara lain:

- 1) Dimensi *Personal Character* : Umur, orang berumur 20-24 tahun (usia muda) sebanyak 15%, berumur 32 tahun 10% dan berumur 47 tahun hanya 5%. Migrasi banyak dilakukan oleh usia muda, karena ia banyak memperoleh manfaat yang panjang dari invetasi dan besarnya nilai sekarang atas manfaat migrasinya.

- 2) Pendidikan, menurut Ehrenberg tersedianya sarana pendidikan di daerah tujuan migrasi turut menjadi daya tarik kegiatan migrasi.
 - 3) Dimensi jarak: teori *human capital* memprediksi jika biaya migrasi meningkat, maka arus migrasi akan menurun.
 - 4) Akses informasi dan,
 - 5) Potensi pendapatan di daerah tujuan
- (Saepudin, 2007:17)

2.2.4 Teori klasik Lewis – Fei - Ranis

Teori klasik ini awal mulanya dikembangkan oleh Prof. W. Arthur Lewis pada tahun 1954, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gustav Ranis dan John Fei pada tahun 1961. Karena itu teori ini lebih dikenal dengan teori Lewis – Fei – Ranis (Sunarto, 1985:26).

Analisa Lewis (1954) berpendapat di negara-negara berkembang terdapat dualisme kegiatan perekonomian, yaitu disektor ekonomi subsistem (pertanian) di pedesaan, dan sektor industri modern dengan produktivitas yang tinggi di daerah perkotaan. Menurut Lewis, bahwa proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang dimulai dari sektor subsistem dalam waktu yang hampir bersamaan dilakukan pembangunan besar-besaran di sektor industri modern, dan terjadi reinvestasi kembali yang diperoleh dari keuntungan dari sektor kapitalis. Produksi di sektor ini mempunyai produktivitas tinggi, sehingga menciptakan pembangunan ekonomi. Sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif lambat,

terjadi kelebihan tenaga kerja dan pemilikan lahan makin sedikit sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang besar di pedesaan. Akibatnya tenaga kerja di sektor pertanian akan pindah ke perkotaan (Sunarto, 1985:22).

Menurut Lewis walaupun tenaga kerja berkurang pada sektor pertanian namun produktivitas pada sektor pertanian tidak berkurang. Sektor industri/kapitalis berkembang dengan pesat yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, mengakibatkan perbedaan upah antara sektor industri dan pertanian makin besar. Oleh karena itu terjadilah migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Lewis membuat asumsi sebagai berikut:

- 1) Pengusaha senantiasa berusaha memaksimalkan keuntungannya. Untuk mencapai ini maka tingkat upah harus sama dengan produk marginal.
- 2) Pengusaha senantiasa menginvestasikan kembali keuntungan yang diperolehnya.

Lewis menggambarkan dengan tumbuhnya sektor industri kapitalis di daerah perkotaan, tenaga kerja dari sektor pertanian di desa akan bermigrasi ke kota dalam rangka memperoleh pekerjaan pada sektor industri, karena sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif lambat, baik di sektor produksi, penyerapan tenaga kerja, demikian juga dengan tingkat upah. Dengan demikian, menurut Lewis surplus tenaga kerja pertanian merupakan kekuatan exogen yang mendorong adanya arus migrasi.

2.2.5 Teori Income Harapan Todaro

Todaro merumuskan suatu migrasi yang dikenal dengan *Expected Income Models of Rural-Urban Migration*. Walaupun keputusan untuk melakukan migrasi tidak rasional namun Todaro mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah merupakan fenomena ekonomi yang rasional (Sunarto, 1985:29). Walaupun pengangguran di kota bertumpuk, tetapi postulat model Todaro adalah bahwa seseorang masih mempunyai harapan untuk mendapatkan *income* yang lebih tinggi daripada upah di sektor pertanian. Alasannya adalah bahwa diperkotaan terdapat bermacam-macam pekerjaan, sehingga seseorang dapat memilih salah satu yang dapat member harapan *income* yang lebih tinggi. Besarnya harapan diukur dengan (1) perbedaan upah riil antara desa dan kota, dan (2) kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan. Essensiv teori dari Todaro adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu harapan *income* di kota masih lebih tinggi dari desa walaupun telah memperhitungkan biaya migrasi (Sunarto, 1985:22). Secara matematis teori Todaro dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E(W_u) = \frac{W_u \cdot E_u}{L_u}$$

Dimana $E(W_u)$ = harapan *income* di kota

W_u = tingginya upah di kota

E_u = jumlah pekerjaan di kota

Lu = jumlah angkatan kerja di kota

Teori yang dikemukakan Todaro memiliki empat karakteristik dasar dalam migrasi desa-kota yaitu:

1. Dorongan utama dalam migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (*benefits*) dan kerugian (*costs*) baik finansial maupun psikologis
2. Keputusan migrasi lebih bergantung kepada harapan (*expected*) daripada perbedaan upah riil sesungguhnya yang terdapat di kota dan di desa, di mana kemungkinan akan harapan ini bergantung kepada interaksi antara 2 variabel yaitu perbedaan upah sesungguhnya antara desa dan kota dan kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota.
3. Kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang terdapat di kota itu
4. Tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja di kota bukanlah suatu kemungkinan, akan tetapi logis dan telah terjadi; begitu pula besarnya perbedaan upah antara desa dengan kota. Tingginya tingkat pengangguran di kota suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di desa dan di kota.

(Sunarto, 1985:30)

2.2.6 Don Bellante dan Marck Jackson (1983)

Migrasi tenaga kerja ke suatu daerah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai suplai dan juga permintaan terhadap tenaga kerja. Jika suplai tenaga kerja bertambah terus, maka pada daerah tersebut akan kelebihan tenaga kerja, sedangkan daerah asal akan kekurangan tenaga kerja. Dalam kondisi demikian

terjadi perubahan tingkat upah. Tingkat upah di daerah tujuan cenderung menurun, dan di daerah asal cenderung naik (Saepudin, 2007:21).

Terdapat beberapa pandangan antara teori migrasi tenaga kerja yang diberikan oleh Lewis (1954) dan yang diberikan oleh Ballente dan Jackson (1983), terutama dari segi tingkat upah. Menurut Lewis tingkat upah terus naik, sampai batas waktu tertentu selama pengusaha terus menanamkan modalnya kembali pada sektor kapitalis. Sedangkan menurut analisis Bellante akan terjadi keseimbangan upah baru antara daerah tujuan dan asal migran, sebagai akibat dari penawaran dan jumlah tenaga kerja.

Keseimbangan upah antar regional yang dicapai merupakan kekuatan pasara tenaga kerja antara kedua daerah, karena dalam analisisnya sudah memasukan unsur *human capital* tenaga kerja. Lewis tidak memasukkan unsur *human capital* tenaga kerja dalam analisisnya dan suplai tenaga kerja migran pada modelnya berasal dari sektor tradisional di pedesaan (Saepudin, 2007:22).

2.3 Model Analisis Mobilitas Penduduk

Jika membaca teori diatas bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan mobilitas penduduk atau migrasi maka munculah model-model yang mengkaji niat seseorang melakukan mobilitas penduduk dan migrasi. Berikut diantaranya:

2.3.1 Model *Human Capital Approach*

Model *Human Capital* pada prinsipnya didasarkan atas teori pembuatan keputusan individu, dengan menekankan aspek investasi dalam rangka peningkatan produktivitas manusia. Dalam model tersebut keputusan individu ditentukan oleh usaha mencari kesempatan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Migrasi dianggap sebagai bentuk investasi individu yang keputusannya ditentukan dengan memperhitungkan biaya dan manfaat. Teori ini semula dibangun oleh Sjaastad (1962) yang selanjutnya dikembangkan oleh Todaro dan dikenal sebagai model Todaro (Susilowati, 2001:5-6).

2.3.2 *Place Utility Model*

Individu dipandang merupakan makhluk rasional yang mampu memilih alternative terbaik dengan membandingkan tempat tinggal yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Kalau tempat tinggal yang sekarang kurang menguntungkan maka individu berniat untuk mencari tempat tinggal yang baru dengan melakukan migrasi. Proses migrasi dinyatakan melalui dua tahap. Tahap pertama individu mengalami ketidakpuasan atau stress dan tahap kedua individu mengevaluasi utilitas tempat untuk melakukan pindah (Susilowati, 2001:6). Oleh karenanya teori migrasi ini disebut juga sebagai stress-threshold model. Faktor-faktor

struktural seperti karakteristik sosio demografi, karakteristik daerah asal dan tempat tujuan serta ikatan sosial dipandang mempengaruhi kepuasan terhadap tempat tinggal seseorang dan berpengaruh terhadap niat bermigrasi (Speare, 1975 dalam Susilowati, 2001:6)

2.3.3 Contextual Analysis

Analisis kontekstual menekankan pada pengaruh faktor latar belakang struktural. Faktor struktural tersebut bisa berupa situasi eksternal makro atau faktor kemasyarakatan, seperti misalnya karakteristik daerah asal dan tujuan, tingkat upah, pemilikan tanah dan sistem pemilikannya, ikatan keluarga dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik dan pelayanan dan sebagainya. Niat migrasi dalam konteks ini dipandang sebagai hasil proses ekologis. Pentingnya analisis kontekstual ini dapat dibaca pada studi yang dilakukan oleh Hugo (1977, 1978) (Susilowati, 2001:6).

2.3.4 Value Expectancy Model

Value expectancy model menekankan pada teori psikologi, dimana fokus utama adalah mempelajari hubungan antara nilai, persepsi dan sikap individu dengan niat bermigrasi. Niat bermigrasi dipengaruhi harapan untuk memperoleh kekayaan, status, kemandirian dan moralitas. Secara empiris karakteristik demografi keluarga, individu dan perbedaan kesempatan kerja antar daerah berpengaruh terhadap niat bermigrasi (Susilowati, 2001:7).

2.4 Pola Mobilitas Penduduk

Secara garis besar, pola mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yakni mobilitas penduduk permanen (migrasi) dan mobilitas penduduk yang non permanen (sirkuler) (Giyarsih, 1999:142). Pola-pola tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Dalam penelitian Giyarsih mengenai mobilitas penduduk di daerah pinggiran kota Yogyakarta bahwa responden migran ketika mereka pindah di daerah asal menuju daerah penelitian adalah mobilitas permanen karena memiliki niat menetap dan mencabut kartu tanda penduduknya di daerah asal. Alasan jarak yang dekat membuat sebagian responden memilih untuk melakukan *nglaju/commuting* atau menginap/mondok (Giyarsih, 1999:149).

Penelitian Sinuraya dan Saptana, terdapat dua pola migrasi, pada pedesaan contoh lahan sawah pola migrasi yang terjadi bersifat musiman, sedangkan pada daerah lahan kering pola migrasi cenderung ke arah pola migrasi tetap. Pola-pola migrasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan menunjukkan bahwa untuk desa yang sangat dekat dengan pusat-pusat kota atau industri dengan aksesibilitas yang baik, jenis migrasi yang dominan dilakukan adalah komutasi sepanjang tahun. Untuk desa yang agak jauh dari pusat kota atau industri ternyata sebagian besar penduduknya ada yang melakukan migrasi secara sirkulasi musiman. Sementara itu, untuk yang sangat jauh dan tujuan migrasinya adalah kota-kota besar

kota provinsi sebagian besar migrasinya adalah migrasi permanen. (Sinuraya dan Saptana, 2004:21)

Perpindahan individu merupakan analisis migrasi dan kecenderungan ini didukung oleh faktor bahwa migrasi biasanya melibatkan orang-orang muda yang belum berkeluarga. Tetapi banyak kasus yang memunculkan bahwa migrasi tidak hanya merupakan suatu perpindahan sekaligus, namun terdapat jenis perpindahan yang berangsur-angsur sepanjang waktu atau yang biasa disebut dengan karier migrasi. Ada tiga migrasi desa ke kota yaitu :

1. Migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka.
2. Migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik ke kampung halaman.
3. Pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen.

Kuatnya ikatan keanggotaan kepada keluarga besar yang berada di desa dan kepada masyarakat pedesaan, dapat membuat bolak-balik ke desa menjadi proporsi yang menarik. Tuntutan yang dibuat oleh kaum migran terhadap sistem perkotaan sangat bervariasi sesuai dengan rencana masa depan mereka. Kaum migran yang belum menikah harapannya tidak terlalu banyak. Banyak kaum migran benar-benar menyadari aspirasi mereka untuk pensiun di desa. Mereka yakin sepanjang mereka bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri, suatu hari nanti mereka akan menetap di kampung halaman mereka (Puspitasari, 2010:43).

2.4.1 Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)

Mobilitas penduduk permanen atau Migrasi adalah perpindahan penduduk untuk tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi, migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Ada dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi yang lain (*United Nation* dalam Sunarto, 1985:17). Jika dilihat dari pengertian di atas konsep migrasi diatas mudah dilaksanakan. Lee dalam Sunarto (1985:17) merumuskan bahwa migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatas baik pada jarak perpindahan atau sifatnya sukarela. Jadi menurut Lee perpindahan dari satu apartemen ke apartemen lain juga termasuk ke dalam migrasi walaupun hanya dipisahkan oleh tembok dan sama seperti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Namun dalam konsep ini lama perpindahan tidak diperhitungkan.

Gould dan Prothero (1975) juga menekankan unsur perpindahan tempat tinggal. Namun menurut mereka, walaupun seseorang telah secara resmi pindah tempat, tetapi apabila ada niat sebelumnya untuk kembali ke

tempat semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkuler bukan migran (Sunarto, 1985:18). Sedangkan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu apabila seseorang dapat disebut sebagai seorang migran apabila orang tersebut telah melewati batas wilayah propinsi dan lamanya bertempat tinggal dan di propinsi tujuan minimal enam bulan.

Hal paling utama dalam menentukan mobilitas tersebut permanen adanya niatan menetap di daerah tujuan. Apabila seseorang yang pindah ke daerah lain tetapi sejak semula telah berniat untuk kembali ke tempat asal maka perpindahan tersebut tidak termasuk migrasi (Steele (1983) dalam Mantra, 2000:228). Contoh dalam hal ini adalah kegiatan merantau masyarakat minangkabau walaupun mereka telah bertempat tinggal cukup lama di daerah tujuan namun mereka memiliki niat untuk kembali ke daerah asal.

Namun terkadang orang yang bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama atau orang yang melaksanakan mobilitas tidak tahu akan niat mereka kelak ketika mereka meninggalkan daerah asal atau seandainya mereka tahu, niat tersebut terkadang sering dirubah karena dipengaruhi oleh pengalaman selanjutnya ditempat tujuan (Mantra, 1985:152).

2.4.2 Mobilitas Penduduk Non Permanen

Mobilitas penduduk non permanen ialah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan (Mantra, 2000:228). Mobilitas penduduk non permanen terbagi dalam empat kategori.

- a. Nglaju/Komuting/Ulang-alik yaitu penduduk yang pergi dalam satu hari dan setelah itu kembali ke tempat asal pada hari itu juga.
- b. Periodik, yaitu penduduk yang pindah dari tempat asal tapi tiap periode kembali ke tempat asal
- c. Musiman, adalah penduduk yang pindah dari tempat asal pada musim-musim tertentu pula
- d. Jangka panjang, yaitu mereka pindah dari tempat asal dan mudik sekali setahun.

2.5 Hakikat Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja tidaklah identik dengan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Tan Goang dalam Mantra, 2000). Tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam studi kependudukan sering disebut tenaga kerja yang diterjemahkan dari istilah *manpower*, yakni seluruh penduduk yang mempunyai potensi untuk

bekerja secara produktif. Indonesia menyebutkan tenaga kerja adalah sebagai penduduk yang berusia di atas 15 tahun keatas disesuaikan dengan ketentuan internasional (LDFEUI, 2010:199).

2.6 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Mobilitas penduduk dan pola mobilitas Penduduk baik permanen (migrasi) maupun non permanen telah banyak dilakukan di beberapa wilayah khususnya di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda. Berikut ini adalah ringkasan dari penelitian tersebut:

Sinuraya dan Saptana (2004), dalam laporan penelitian *Migrasi Tenaga Kerja Pedesaan dan Pola Pemanfaatannya. Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian tahun 2004*. menunjukkan bahwa hasil kajian di lapang khususnya di pedesaan Jawa menunjukkan pola-pola migrasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan menunjukkan bahwa untuk desa yang sangat dekat dengan pusat-pusat kota atau industri dengan aksesibilitas yang baik, jenis migrasi yang dominan dilakukan adalah komutasi sepanjang tahun. Untuk desa yang agak jauh dari pusat kota atau industri ternyata sebagian besar penduduknya ada yang melakukan migrasi secara sirkulasi musiman. Sementara untuk yang sangat jauh dan tujuan migrasinya adalah kota-kota besar kota provinsi sebagian besar migrasinya adalah migrasi permanen.

Hasil kajian kualitatif di lapang menunjukkan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi sangat dipengaruhi oleh rata-rata luas lahan yang dimiliki, kualitas lahan yang dicerminkan oleh tipe irigasi, umur migran, tingkat pendidikan, aksesibilitas desa-kota, perkembangan kesempatan kerja di luar sektor pertanian di pedesaan, dan perkembangan tingkat upah riil sektor pertanian di pedesaan.

Listyarini (2011) dalam skripsinya *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Pati Jawa Tengah Ke Malaysia (Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tayu)* menunjukkan Hasil analisis Binary Logistic Regression Model menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat migrasi tenaga kerja wanita Kabupaten Pati, khususnya Kecamatan Sukolilo, Gabus dan Tayu untuk bekerja di Malaysia adalah Tingkat Pendidikan (EDUC), Kepemilikan Lahan (LAND), Status Perkawinan (MARRY) dan Ketersediaan Pekerjaan di Daerah Asal (JOBMANY). Faktor Umur (AGE), Statu Pekerjaan di Daerah Asal (JOBVLG) dan Pendapatan di Daerah Asal (INCOME) tidak berpengaruh secara signifikan.

Noer (2008) *Perempuan dan Migrasi: Studi Mengenai Migrasi Individual Perempuan Madura di Kabupaten Bekasi* Laporan Penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh perempuan Madura di Bekasi mengikuti tiga pola umum, yaitu: (1) bermigrasi ke tempat dimana terdapat anggota keluarga, (2) bermigrasi ke tempat yang tidak ada anggota keluarga namun memiliki kelompok etnis yang sama, atau (3) bermigrasi ke tempat yang benar-benar baru.

Alasan utama perempuan Madura melakukan migrasi adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan mencari kesempatan kerja yang lebih terbuka ketimbang di daerah asal mereka. Migrasi individual yang dilakukan oleh para perempuan Madura ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas permasalahan perempuan, di mana masalah migrasi ini jelas tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, namun juga terkait dengan faktor sosial dan budaya. Sebagai sebuah studi, migrasi individual ini memberikan gambaran betapa usaha perempuan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah pilihan yang terbatas. Satu hal yang harus dicatat, bahwa semua subjek mengakui, bahwa mereka sama sekali tidak menyesal ketika harus meninggalkan kampung halaman untuk bermigrasi di Bekasi.

Giyarsih (1999) *Mobilitas Penduduk Daerah Pinggiran Kota Di Dusun Kadapiro dan Dusun Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul* menjelaskan mobilitas penduduk di daerah pinggiran kota Yogyakarta bahwa responden migran ketika mereka pindah di daerah asal menuju daerah penelitian adalah mobilitas permanen karena memiliki niat menetap dan mencabut kartu tanda penduduknya di daerah asal. Alasan jarak yang dekat membuat sebagian responden memilih untuk melakukan *nglaju/commuting* atau menginap/mondok. Pendorong migrasi utama adalah faktor ekonomi.

2.7 Kerangka Berpikir

Proses pembangunan dan industrialisasi telah mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah terutama antara desa dan kota. Kota dengan industrialisasi menjadi wilayah yang lebih maju ketimbang desa dengan pertanian. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara desa dan kota. Mekanisasi pertanian mengakibatkan lapangan pekerjaan di desa semakin berkurang. Padahal penambahan penduduk terus meningkat.

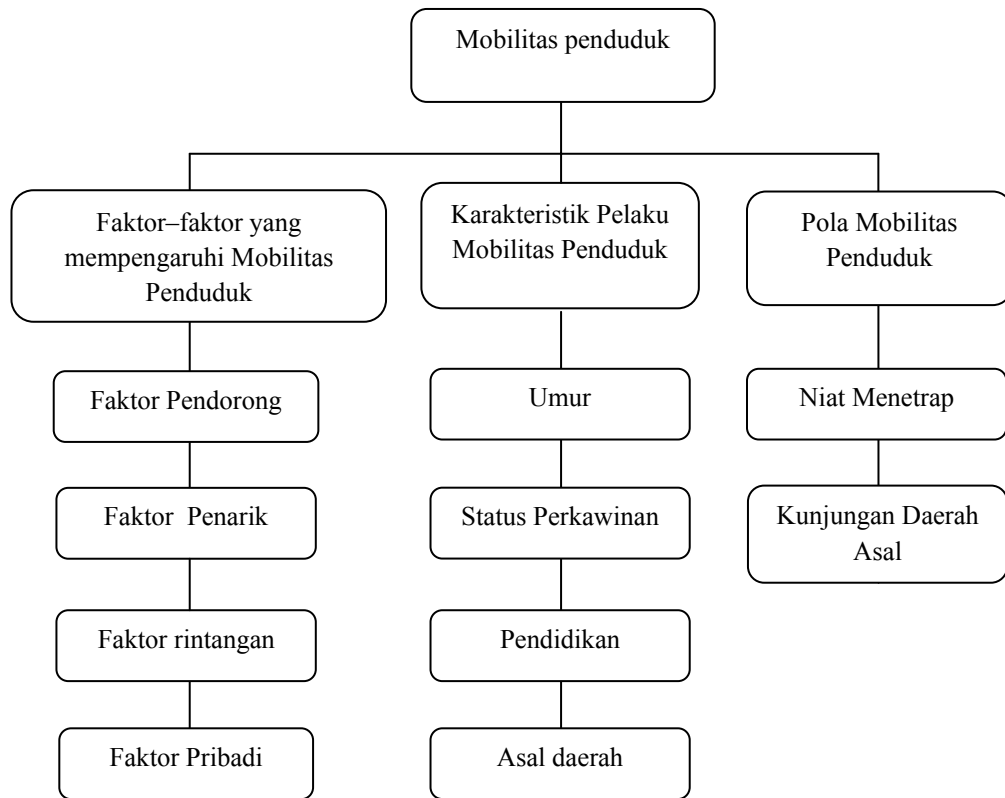
Kebutuhan akan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik menjadi tekanan tersendiri bagi penduduk terutama penduduk desa akibat dari berkurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah riil. Tekanan-tekanan tersebut menjadi salah satu faktor seseorang memutuskan untuk melakukan mobilitas penduduk. Apabila tekanan atas kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka dia akan tetap tinggal, akan tetapi apabila tekanan atas kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka ia akan memutuskan untuk melakukan migrasi.

Mobilitas penduduk tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi juga oleh kaum perempuan. Kecenderungan perempuan untuk melakukan mobilitas penduduk semakin tinggi terutama pada perempuan usia produktif. Padahal dahulu fenomena ini masih jarang terjadi.

Keputusan melakukan mobilitas penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk

bermigrasi, yaitu (1) faktor – faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor – faktor pribadi. Selain itu fenomena migrasi yang terjadi tentu memiliki pola yang khas terkait dengan bagaimana niatan menetap dan lama tinggal seseorang di daerah tujuan dalam hal kunjungan ke daerah asal. Proses mobilitas penduduk tersebut pada akhirnya juga ikut memperlihatkan bagaimana karakteristik seseorang yang melakukan mobilitas ke suatu tempat. Karakteristik pelaku mobilitas, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pola mobilitas yang terbentuk saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan ketiga hal tadi yang biasa dikaji dalam pengkajian mengenai mobilitas penduduk.

Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta banyak terdapat industri tidak luput dari adanya fenomena migrasi termasuk migrasi tenaga kerja perempuan. Fenomena mobilitas penduduk ini tentu dipengaruhi faktor-faktor seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Fenomena mobilitas penduduk pada tenaga kerja perempuan yang terjadi di Kabupaten Bekasi tentu membentuk sebuah pola tersendiri yang menarik dikaji. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana proses mobilitas penduduk terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan karakteristik perempuan yang melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi.



Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, faktor-faktor yang mempengaruhi pola mobilitas penduduk tenaga kerja perempuan ke Kabupaten Bekasi, karakteristik tenaga kerja perempuan yang melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi, dan pola mobilitas penduduk tenaga kerja perempuan ke Kabupaten Bekasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bekasi khususnya di 2 (dua) kecamatan yang memiliki industri besar dan menjadi kantong migran, yang kemudian dipilih secara acak (*random*) sehingga diperoleh 2 (dua) kecamatan terpilih yakni Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat. Kemudian dari 2 (dua) kecamatan yang terpilih, dipilih 3 (tiga) desa yakni Desa Cibuntu di Kecamatan Cibitung dan Desa Sukadanau dan Desa Gandamekar yang terletak di Kecamatan Cikarang Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2012 – Maret 2012.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian pola mobilitas penduduk ini bersifat penelitian deskriptif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan apa adanya pada saat penelitian dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2009:234) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui survei. Survei adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit, atau individu dalam waktu yang bersamaan (Tika, 2005:6).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja perempuan yang melakukan migrasi ke wilayah Kabupaten Bekasi, memiliki pekerjaan serta tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi. Data yang digunakan adalah data jumlah penempatan tenaga kerja perempuan yang ditempatkan dalam kurun waktu 2005-2010 yakni sejumlah 17.643 orang. Dalam menentukan besaran sampel yang harus diambil dari populasi digunakan rumus Slovin (Umar, 2005:78) seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e =Nilai kritis (batas ketelitian) yang merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir maksimal kelonggaran sebesar 10%.

$$n = \frac{17.643}{1+17.643(0.1)^2} = 99.436$$

Jumlah sampel yang harus diambil dari populasi yang ada sebanyak 99,36 orang responden dan digenapkan menjadi 100 orang responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan (Sugiyono 2011:85). *Cluster sampling* yang digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel. Artinya pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah yang ada, karena melibatkan populasi yang besar yang tersebar di daerah yang luas. Pengambilan sampel berdasarkan daerah/kecamatan yang dianggap sebagai ‘kantong-kantong’ migrasi atau pelaku mobilitas penduduk. Adapun yang dimaksud ‘kantong migrasi’ disini adalah kecamatan/daerah yang terdapat industri besar karena banyak terdapat tempat yang disewakan (kost) untuk menginap/mondok responden di Kabupaten Bekasi.

Pemilihan daerah ini juga didasarkan atas kepadatan penduduk tinggi dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh ditentukan dua kecamatan yakni di Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Cikarang Barat,

Selanjutnya dari masing-masing tempat diambil sampel sebanyak 50 orang untuk Kecamatan Cibitung, dan 50 orang untuk Kecamatan Cikarang Barat.

3.5 Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data, beberapa jenis data yang dikumpulkan terkait dengan judul penelitian, yaitu pola mobilitas tenaga kerja perempuan ke Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Data-data tersebut, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden di lokasi yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner atau angket dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data yang dicari adalah mengenai bagaimana pola mobilitas penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk, dan karakteristik tenaga kerja perempuan yang melakukan mobilitas penduduk di wilayah penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi yang menggunakan studi kepustakaan yang dikumpulkan dari suatu lembaga survey, perpustakaan atau lembaga - lembaga negara yang memiliki pustaka data yang terbaru. Data sekunder yang didapat diantaranya Kabupaten Bekasi dalam angka 2009, Data Supas 2005.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner atau angket. Angket dapat dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner atau angket dan wawancara mendalam. Kuesioner atau angket dapat dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, dikategorikan angket semi terbuka.

Adapun aspek utama yang menjadi dasar dalam penyusunan angket adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik responden Pelaku Mobilitas Penduduk
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Mobilitas Penduduk
3. Pola Mobilitas Penduduk

Aspek	Indikator	Sub Indikator	No. Butir
Karakteristik responden Pelaku Mobilitas Penduduk	1. Profil migran	- Umur	2
		- Status Perkawinan	4
		- Pendidikan	6

Aspek	Indikator	Sub Indikator	No. Butir
Karakteristik responden Pelaku Mobilitas Penduduk	Profil migran	- Asal daerah	7
Faktor–faktor yang mempengaruhi Mobilitas Penduduk	1. Faktor Pendorong	- Kepemilikan rumah di daerah asal	8,9
		- Pekerjaan di daerah asal	10,11
		- Pendapatan migran di daerah asal	12
	2. Faktor Penarik	- Kemudahan mendapatkan pekerjaan di daerah asal	13
		- Kemudahan mendapatkan pekerjaan di Kab. Bekasi	14
		- Pendapatan di Kab. Bekasi	15
		- Teman Tinggal	16
		- Status tempat tinggal	17
		- Kenyamanan Lingkungan	18
	3. Faktor Pribadi	- Sumber Inisiatif	19
		- Informasi daerah tujuan	20

Aspek	Indikator	Sub Indikator	No. Butir
Faktor–faktor yang mempengaruhi Mobilitas Penduduk	3. Faktor Pribadi	- Alasan Migrasi ke Kab. Bekasi	21
	4. Faktor Rintangan	- Transportasi yang digunakan	22
		- Kemudahan transportasi	23
		- Biaya Transportasi	24,25
		- Biaya hidup di Kab. Bekasi	26,27
Pola Mobilitas Penduduk	1. Niatan Menetap	- Niatan menetap	28
	2. Hubungan Dengan Daerah Asal	- Hubungan dengan daerah asal	29
		- Frekuensi kunjungan	30

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persentase. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut yakni disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, disebelah barat dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi serta berbatasan dengan Kabupaten Karawang di sebelah Timur. Letak astronomis Kabupaten Bekasi yakni $106^{\circ} 58' 5'' - 107^{\circ} 17' 45''$ BT dan $05^{\circ} 54' 50'' - 06^{\circ} 29' 15''$ LS.

Kabupaten Bekasi memiliki suhu rata-rata antara $28^{\circ}\text{C}-32^{\circ}\text{C}$. Curah hujan yang turun adalah sebanyak 86,37mm (Tahun 2006). Rata-rata hari hujan yakni 60,48mm (Tahun 2006). Ketinggian Kabupaten Bekasi yakni antara 0–115mdpl dengan kemiringan berkisar antara $0 - 25^{\circ}$.

Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 aliran sungai besar yaitu: Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai

Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengseng, Sungai Sepak dan Sungai Jaeran. Lebar sungai tersebut berkisar antara 3 sampai 80 meter.

Kabupaten Bekasi memiliki 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu: Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu, Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Situ Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.

Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.

Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Kabupaten Bekasi memiliki penduduk dengan jumlah sebanyak 2.193.776 jiwa (Tahun 2008) dengan kepadatan penduduk yakni 1.465 jiwa/km² serta jumlah kepala keluarga sebanyak 528.166.

Luas wilayah Kabupaten Bekasi yakni 127.388 ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 23 kecamatan dan jumlah desa sebanyak 187 desa. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong,

sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten, adapun luas wilayah dan jumlah desa per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

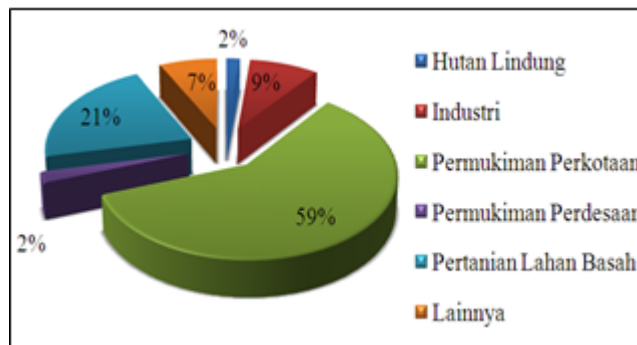
Tabel 5. Luas wilayah dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Ha	%	
1	Setu	6.216	4,88	11
2	Serang Baru	6.380	5,01	8
3	Cikarang Pusat	4.760	4,06	6
4	Cikarang Selatan	5.174	3,74	7
5	Cibarusah	5.039	4,03	7
6	Bojongmangu	6.006	4,21	6
7	Cikarang Timur	5.131	3,40	8
8	Kedungwaringin	3.153	3,96	7
9	Cikarang Utara	4.330	4,71	11
10	Karang Bahagia	4.610	2,48	8
11	Cibitung	4.530	3,62	7
12	Cikarang Barat	4.369	3,56	11
13	Tambun Selatan	4.310	3,38	10
14	Tambun Utara	3.442	2,70	8
15	Babelan	6.360	4,99	9
16	Tarumajaya	5.463	4,29	8
17	Tambelang	3.791	5,27	7
18	Sukawangi	6.719	2,98	7
19	Sukatani	3.752	2,95	7
20	Sukakarya	4.240	3,33	7
21	Pebayuran	9.634	7,56	13
22	Cabangbungin	4.970	3,90	8
23	Muaragembong	14.009	11,00	6
Kabupaten Bekasi		127.388	100	187

Sumber : BPS Bekasi 2009

4.1.1 Kecamatan Cibitung

Secara administratif, Kecamatan Cibitung terbagi menjadi 7 Desa yaitu Desa Cibuntu, Wanasari, Wanajaya, Sukajaya, Kertamukti, Muktiwari, dan Sarimukti. Secara topografi, Kecamatan Cibitung merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang pada tahun 2006, 59% luas wilayah Kecamatan Cibitung, yaitu 2678 Ha, merupakan permukiman perkotaan. Hal tersebut didorong oleh berkembangnya kawasan industri di Kecamatan Cibitung, luas kawasan industri sekitar 388,6 Ha (9%). Di sisi lain, Kecamatan Cibitung juga memiliki pertanian lahan basah yang cukup luas, yaitu seluas 963,24 Ha dan hutan lindung seluas 75,87 Ha.



Sumber: RTRW Kabupaten Bekasi, Tahun 2009-2029.

Gambar 2. Pemanfaatan Lahan Kecamatan Cibitung

4.1.2 Kecamatan Cikarang Barat

Secara administratif, Kecamatan Cikarang Barat yang memiliki luas sebesar 5.273,82 Ha terbagi menjadi 11 desa, yang terdiri dari:

1. Telajung
2. Cikedokan
3. Jatiwangi
4. Mekarwangi
5. Gandamekar
6. Danauindah
7. Gandasari
8. Sukadanau
9. Telagaasih
10. Telagamurni
11. Kalijaya

Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Cikarang Barat termasuk dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 20 - 25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang pada tahun 2006, sebanyak 73% luas wilayah Kecamatan Cikarang Barat, yaitu 4,033.76 Ha, merupakan kawasan industri. Hal tersebut mendorong terbangunnya permukiman perkotaan di Kecamatan Cikarang Barat seluas 1.473,43 Ha (26%). Penggunaan lahan

lainnya, seperti hutan lindung, pertanian, maupun permukiman perdesaan sangat minim, hanya 1% dari luas wilayah Cikarang Barat.

4.1.3 Kondisi Kependudukan Kabupaten Bekasi

Pada tahun 2008, penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.193.776 jiwa, yang terdiri dari 1.122.855 laki-laki dan 1.070.921 perempuan. Dari tahun 2004 hingga 2008, Kabupaten Bekasi terus mengalami penambahan jumlah penduduk, dari 1.950.209 jiwa pada tahun 2004, 2.027.902 jiwa pada tahun 2005, 2.054.795 jiwa pada tahun 2006, 2.125.960 jiwa pada tahun 2007, hingga mencapai 2.193.776 jiwa pada tahun 2008. Perkembangan sektor industri yang pesat merupakan pemicu terjadinya penambahan penduduk di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun. Banyak tenaga kerja industri yang datang dari luar Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2008, penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.513.029 orang (68,97%), sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 399.134 orang (18,19%) dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 67.005 orang (3,05%). Beban ketergantungan masih cukup tinggi yaitu sebesar 44,99. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bekasi menanggung beban kebutuhan ekonomi dari sekitar 45

penduduk usia tidak produktif. Dibutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak untuk menanggung beban kebutuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2008

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2004	2005	2006	2007	2008
Setu	73.888	76.83	77.776	80.476	83.016
Serang Baru	59.943	62.329	63.168	65.353	67.433
Cikarang Pusat	39.712	41.291	41.804	43.25	44.644
Cikarang Selatan	78.155	81.27	82.385	85.26	87.969
Cibarusah	57.921	60.232	61.042	63.188	65.189
Bojongmangu	23.446	24.378	24.691	25.505	26.286
Cikarang Timur	70.955	73.781	74.759	77.348	79.823
Kedungwaringin	49.575	51.551	52.224	54.025	55.737
Cikarang Utara	154.216	160.363	162.546	168.181	173.601
Karangbahagia	73.964	76.908	77.951	80.654	83.232
Cibitung	138.398	143.914	145.85	150.881	155.679
Cikarang Barat	149.594	155.566	157.631	163.079	168.261
Tambun Selatan	328.11	341.175	345.78	357.781	369.233
Tambun Utara	85.609	89.017	90.221	93.347	96.326
Babelan	141.5	147.139	149.132	154.301	159.247
Tarumajaya	79.204	82.363	83.492	86.381	89.124
Tambelang	33.374	34.703	35.119	36.294	37.41
Sukawangi	39.879	41.466	41.972	43.418	44.78
Sukatani	61.057	63.487	64.339	66.597	68.743
Sukakarya	42.085	43760	44328	45.859	47.343
Pebayuran	88.349	91.867	93.049	96.316	99.444
Cabangbungin	46.552	48.404	48.998	50.686	52.289
Muaragembong	34.723	36.108	36.538	37.78	38.967
Kabupaten Bekasi	1.950.209	2.027.902	2.054.795	2.125.960	2.193.776

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2009

Keberadaan penduduk menurut kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan yaitu 369.233 jiwa, diikuti oleh Cikarang Utara sebanyak 173.601 jiwa dan

Cikarang Barat sebanyak 168.261 jiwa. Hal tersebut juga selaras dengan kepadatan penduduknya dimana Kecamatan Tambun Selatan dan Cikarang Utara memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan Cikarang Barat dan Cibitung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Hal tersebut dipicu oleh berkembangnya sektor industri, dari mulai industri berskala besar hingga mikro pada kecamatan-kecamatan tersebut.

Masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Bekasi berdampak juga pada meningkatnya kesempatan kerja, namun pemenuhan kebutuhan tenaga kerja juga berdatangan dari luar Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2008 kelompok usia ini berjumlah 1.580.034 orang (72,02%). Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Depnaker tercatat 38.738 orang, meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, lowongan tenaga kerja pada tahun 2008 jauh lebih sedikit dari jumlah pencari kerja, yaitu sebanyak 6.970 lowongan menurun drastis dari tahun sebelumnya sebesar 15.847 lowongan. Hal tersebut berimplikasi pada proposi penempatan kerja, dimana hanya 2.514 orang (6,49%) dari pencari kerja tersebut yang sudah mendapat penempatan. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, sejak berkembangnya sektor industri, tenaga kerja mayoritas berada pada sektor industri pengolahan. Pada tahun 2006, dari

371.396 tenaga kerja terdapat 88% tenaga kerja yang bekerja pada industri pengolahan.

4.1.3.1 Kependudukan Kecamatan Cibitung

Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Cibitung memiliki 144.034 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki sebanyak 70.466 jiwa dan perempuan sebanyak 73.568 jiwa. Persebaran penduduk di Kecamatan Cibitung tidak merata, hampir 50% penduduk terkonsentrasi di Desa Wanasari (70.910 jiwa) yang sumber penghasilan utama penduduknya berasal dari jasa. Selain itu, penduduk juga terkonsentrasi pada Desa Wanajaya (25.370 jiwa) dan Desa Cibuntu (19.146 jiwa). Penduduk cenderung berkonsentrasi pada wilayah yang memiliki bangkitan kegiatan ekonomi yang tinggi seperti desa-desa yang memiliki sumber penghasilan dari sektor jasa dan industri pengolahan. Adapun daerah yang digerakkan oleh sektor pertanian memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah.

4.1.3.2 Kependudukan Kecamatan Cikarang Barat

Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Cikarang Barat memiliki 165.389 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki (82.980 jiwa) dan perempuan (82.409 jiwa) yang seimbang. Persebaran penduduk di Kecamatan Cikarang Barat tidak merata, penduduk

terkonsentrasi pada wilayah permukiman yang tumbuh berkembang di sekitar kawasan industri. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepadatan penduduk pada Desa Kalijaya (83 jiwa/Ha), Telagamurni (78 jiwa/Ha), Telagaasih (60 jiwa/Ha), dan Sukadanau (47 jiwa/Ha), dimana daerah-daerah tersebut memiliki sumber penghasilan utama dari sektor industri pengolahan serta perdagangan besar/eceran dan rumah makan. Adapun daerah yang digerakkan oleh sektor pertanian memiliki kepadatan penduduk yang rendah.

4.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Bekasi

Pergerakan ekonomi Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir (2005-2009) memperlihatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 6% setahun. Struktur perekonomian yang menopang pertumbuhan tersebut antara lain adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, sektor pertambangan/penggalian. Sektor riil (non-keuangan) pengolahan tumbuh rata-rata di atas 6% pertahun kecuali sektor pertanian, sektor penggalian/pertambangan dan sektor industri dengan kisaran laju 3%-5% pertahun. Untuk industri dengan pertumbuhan 4%-5% pertahun sudah sangat baik karena besarnya output sektor ini. Diakui pergerakan ekonomi pada sektor riil terutama sektor pertanian di Kabupaten Bekasi nampaknya belum memberikan harapan dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pada

sektor ini yang relatif kecil dalam 10 tahun terakhir. Sementara sektor non-riil (keuangan) tumbuh rata-rata diatas 6%.

4.1.4.1 Kondisi Perekonomian Kecamatan Cibitung

Kecamatan Cibitung memiliki 156 industri kecil yang sebagian besar merupakan kerajinan rumah tangga. Bentuk kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Kecamatan Cibitung adalah kerajinan dari kayu seperti pembuatan perabotan rumah tangga (lemari, kursi, meja, dan sebagainya), yang tersebar di Desa Wanasari, Wanajaya, dan lainnya. Selain itu, industri rumah tangga pembuatan makanan juga berkembang di seluruh desa di Kecamatan Cibitung. Ditinjau dari angka sementara PDRB Kecamatan Cibitung tahun 2007 yaitu sebesar Rp 4.704.563.040.000,00 maka sektor industri pengolahan memegang peranan penting dengan menyumbang 80% bagi PDRB, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberi kontribusi sebesar 13% bagi PDRB. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 6%. Sementara sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar desa di Kecamatan Cibitung memberikan kontribusi yang kecil bagi PDRB, hanya sebesar 1%.

4.1.4.2 Kondisi Perekonomian Kecamatan Cikarang Barat

Kecamatan Cikarang Barat memiliki 296 industri kecil yang sebagian besar merupakan kerajinan rumah tangga yang tersebar di seluruh desa. Bentuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Kecamatan Cikarang Barat adalah kerajinan dari kayu seperti pembuatan perabotan rumah tangga (lemari, kursi, meja, dan sebagainya), kerajinan dari logam, dan industri makanan. Berkembangnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kecamatan Cikarang Barat didukung oleh keberadaan Kawasan Industri MM2100. Ditinjau dari angka sementara PDRB Kecamatan Cikarang Barat tahun 2007 yaitu sebesar Rp 9.596.042.100.000,00, maka sektor industri pengolahan memegang peranan sangat penting dengan menyumbang 91% bagi PDRB, sedangkan sektor lainnya hanya memberi kontribusi yang sangat kecil. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 6%.

4.2 Karakteristik Responden Migran Perempuan

4.2.1 Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa usia perempuan yang melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi didominasi oleh perempuan yang berusia antara 20-24 tahun yakni sebanyak

40% responden, responden yang berusia antara 25-29 tahun sebanyak 19%, responden berusia 30-34 tahun sebanyak 16, responden yang berusia antara 35-38 tahun sebanyak 13%, responden yang berumur antara 15-19 tahun sebanyak 6%, responden berumur antara 40-44 sebanyak 4%, 15 berumur antara 45-49 tahun dan 1% lainnya berumur antara 50-54 tahun (lihat tabel 7). Jika dijumlahkan dapat diketahui bahwa responden perempuan yang melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi 73% berumur antara 20-34 tahun. Sedangkan perempuan berumur 15-19 tahun hanya sebesar 6% dan perempuan berumur di atas 35 tahun sebesar 19%

Tabel 7. Responden Berdasarkan Kelompok umur

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
15-19	6	6
20-24	40	40
25-29	19	19
30-34	16	16
35-39	13	13
40-44	4	4
45-49	1	1
50-54	1	1
55-59	0	0
60-64	0	0
≥ 65	0	0
Total	100	100

Sumber : Data Primer (diolah), 2012

Secara teoritis penduduk yang melakukan migrasi atau pindah umumnya terjadi pada fase ketidakmapanan menuju masa kemapanan

individu. Fase kemapanan adalah periode umur di atas 34 tahun, sedangkan umur antara 15-20 tahun merupakan fase awal (umur remaja) yang masih ditunjang oleh kemapanan orang tuanya, baik ketika masa sekolah (SMU atau Perguruan Tinggi) ataupun pada awal-awal selesai sekolah, sehingga mobilitas tenaga kerja pada kelompok umur 15-20 tahun tidak terlampau besar (Saepudin, 2007:78). Hal ini seperti terlihat pada hasil penelitian dimana responden yang berumur antara 15-19 tahun hanya sebesar 6%.

Jumlah kelompok umur responden 20-34 tahun yang besar yakni sebesar 73% dikarenakan umur antara 20-34 tahun tersebut merupakan golongan usia muda. Pada kelompok usia ini biasanya seseorang telah menyelesaikan masa pendidikannya dan dirasa cukup matang untuk mulai hidup mandiri. Kelompok usia ini pada umumnya belum mapan secara individu, khususnya dalam kemampuan ekonomi, sehingga pada fase tersebut terjadi migrasi yang cukup besar (Saepudin, 2007:78). Hasil ini juga sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ravenstein dimana penduduk usia muda lebih banyak melakukan mobilitas dibanding yang lain (Mantra, 2000:243).

Jumlah responden migran perempuan berumur di atas 35 tahun yang hanya sebesar 19% menunjukkan bahwa kelompok usia ini tidak begitu banyak yang melakukan migrasi. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kondisi ekonomi individu tersebut sudah mulai mapan, seperti sudah mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, sudah punya rumah sendiri, sudah

menikah dan sebagainya, sehingga dorongan untuk melakukan migrasi atau mobilitas penduduk lebih kecil (Saepudin, 2007:79).

4.2.2 Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan, responden yang berstatus kawin sebanyak 58% responden, belum kawin sebanyak 40% dan responden yang pernah kawin sebanyak 2% (lihat tabel 8). Hasil ini menunjukkan bahwa responden yang kawin lebih banyak dibanding responden yang belum kawin dan pernah kawin. Ada tendensi bahwa mereka yang berstatus kawin memang lebih besar kecenderungannya untuk melakukan migrasi atau perpindahan penduduk (Syafiudin dkk, 1985:63). Orang dengan status kawin mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada status belum atau pernah menikah (Saepudin, 2007:79). Selain itu pada perempuan yang sudah menikah ada dorongan dan rasa tanggung jawab untuk ikut bersama suami pindah ke tempat suami bekerja.

Tabel 8. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Pernikahan	Jumlah	Persentase (%)
Belum Menikah	40	40
Menikah	58	58
Pernah menikah	2	2
Total	100	100

Sumber : Data primer (diolah), 2012

Namun, perlu dicermati jumlah responden yang belum menikah sebesar 40% menunjukkan adanya fenomena yang berbeda dimana kini banyak

perempuan muda yang berstatus belum kawin melakukan mobilitas penduduk. Padahal dahulu hal ini masih sangat jarang terjadi, mobilitas penduduk perempuan biasanya didominasi oleh perempuan berstatus kawin.

4.2.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden kebanyakan berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yakni sebanyak 60% responden, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 27%, Perguruan Tinggi sebanyak 8% dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5%. Jika dikaitkan dengan teori, maka hal ini menjadi sangat wajar. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung melakukan mobilitas ketimbang yang berpendidikan rendah, hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih mampu beradaptasi dengan baik. Hal ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil penelitian dengan apa yang dikemukakan oleh Ravenstein (Mantra, 2000:243) dan Ehrenberg (Saepudin 2007:16-17) bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam migrasi atau mobilitas penduduk.

Selain faktor di atas alasan lain yang membuat migran perempuan yang masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi di dominasi oleh mereka yang berpendidikan sekolah menengah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah faktor kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil

dan terdidik yang minimal berpendidikan Sekolah menengah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 9. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	5	5
SMP	27	27
SMA	60	60
Perguruan Tinggi	8	8
Total	100	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

4.2.4 Responden Berdasarkan Daerah Asal

Berdasarkan daerah asal, responden di dominasi mereka yang berasal kabupaten atau kota dari wilayah Pulau Jawa yakni kabupaten atau kota di propinsi Jawa Barat (selain Kabupaten Bekasi) dan Propinsi Banten sebesar 33% responden, kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebanyak 34% responden, Jabodetabek (selain Kabupaten Bekasi) sebanyak 14% responden, dan responden yang berasal dari kabupaten/kota di luar Pulau Jawa sebanyak 11%. Hasil ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja perempuan yang masuk ke Kabupaten Bekasi didominasi oleh dua daerah yakni responden yang bberasal dari kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat dan Banten serta Jawa Tengah dan DIY.

Faktor jarak diungkapkan dalam beberapa penelitian terkait dengan beberapa sebab, pertama, kemudahan mencapai daerah tujuan (akses) dimana

daerah terdekat akan lebih mudah diakses dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh migran maupun fasilitas yang tersedia antara daerah asal dengan daerah tujuan. Kedua, hal ini terkait pula biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mobilitas penduduk tersebut. Semakin dekat daerah tujuan migran maka semakin murah biaya yang harus ditanggung oleh migran tersebut (Saepudin, 2007:73).

Tabel 10. Responden Berdasarkan Daerah Asal

Asal daerah	Persentase (%)
Jabodetabek	14%
Jawa Barat dan Banten	33%
Jawa Tengah dan DIY	34%
Jawa Timur	7%
Luar Jawa (Sumatera)	11%
Total	100%

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Banyaknya responden yang berasal dari daerah Jawa Barat dan Banten serta Jawa Tengah dan DIY ini terjadi dapat disebabkan karena jarak dan aksesibilitas di kedua daerah ini relatif mudah. Ravenstein menyatakan bahwa wanita cenderung bermigrasi ke daerah yang dekat letaknya (Sunarto, 1985:23). Tabel 10 juga menunjukkan bahwa jumlah responden yang berasal dari daerah yang lebih jauh juga semakin sedikit. Dalam hal ini Ravenstein menjelaskan bahwa semakin jauh jarak semakin berkurang volume migran atau orang yang melakukan mobilitas, teori ini dikenal sebagai *distance decay theory*.

Hal lain yang mendukung banyaknya tenaga kerja perempuan yang berasal dari kedua daerah itu adalah aksesibilitas yang baik dimana sarana dan prasarana transportasi relatif baik. Kabupaten Bekasi yang dilalui oleh dua jalur utama pulau jawa yakni jalur pantura serta jalan tol Jakarta-Cikampek membuat Kabupaten beksi mudah diakses. Selain itu banyaknya sarana transportasi terutama bus yang melayani rute Kabupaten Bekasi dengan kota-kota di Jawa tengah dan Jawa Barat juga membuat keinginan melakukan mobilitas penduduk menjadi lebih besar.

4.3 Analisis Faktor

4.3.1 Faktor Pendorong

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk salah satunya adalah faktor pendorong di daerah asal yang biasanya berupa tekanan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Faktor pendorong tersebut bisa berupa kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologi (Mantra, 2000:231-232). Faktor tersebut seperti teman tinggal di daerah asal (tekanan psikologi dan sosial), kepemilikan tempat tinggal (tekanan psikologi), lapangan pekerjaan (tekanan ekonomi) dan pendapatan di daerah asal (tekanan ekonomi).

1. Teman Tinggal di Daerah Asal

Hasil olah data kuesioner menunjukkan bahwa responden migran perempuan di daerah asal kebanyakan tinggal bersama orang tua yakni

sebesar 81%, 5% responden tinggal bersama saudara, 10% responden tinggal dengan suami, 3% tinggal sendiri dan 1% responden lainnya tinggal dengan tetangga (lihat tabel 11).

Tabel 11. Responden Berdasarkan Teman Tinggal Di Daerah Asal dan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Teman Tinggal					Persentase (%)
	Orang Tua	Saudara	Suami	Sendiri	Lainnya	
Kawin	41	5	10	2	0	58
Belum Kawin	38	0	0	1	1	40
Pernah Kawin	2	0	0	0	0	2
Total	81	5	10	3	1	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Seseorang yang tinggal dengan orang tuamenyebabkan mereka memiliki rasa sungkan atau tidak enak jika lebih lama tinggal bersama orang tua atau saudara. Jika dikaitkan dengan umur responden yang berumur muda (umur 21-34 tahun) yang merupakan fase remaja sudah mulai timbul keinginan untuk mandiri. Hal ini terjadi karena pada fase ini mereka mulai selesai dari masa sekolah ataupun kuliah sehingga mereka berkeinginan untuk bekerja dan hidup mandiri. Selain itu mereka memiliki semacam beban pada orang tua atau saudara jika masih disokong oleh kemapanan orang tua atau saudara. Berbagai alasan tersebut turut mendorong mereka untuk melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk. Bagi responden yang berstatus kawin dan tinggal bersama orang tua atau saudara terdapat tekanan dimana mereka

memiliki rasa tanggung jawab pada suami untuk merawat suami dan untuk membantu suami di daerah tujuan dalam rangka menambah pendapatan keluarga, serta berkeinginan untuk hidup terpisah dengan orang tua atau saudara.

Untuk responden yang tinggal dengan suami mereka akan memilih ikut suami melakukan migrasi ke daerah tempat kerja suami. Sedangkan yang tinggal sendiri tentu ingin mencari pengalaman atau alasan ekonomi.

2. Kepemilikan Tempat Tinggal di Daerah Asal

Kepemilikan tempat tinggal juga turut mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Dari hasil olah data kuesioner terlihat bahwa 90% responden migran perempuan tinggal di rumah milik orang tua mereka dengan 49% diantara mereka berstatus menikah, 39% belum menikah dan 2% sudah pernah menikah (lihat tabel 12). Seseorang yang sudah dianggap dewasa dan mampu hidup mandiri akan merasa sungkan jika masih tinggal menumpang dengan orang lain terutama orang tua. Hal ini akan menjadi lebih berpengaruh kepada migran perempuan yang sudah menikah, karena ada anggapan seharusnya mereka tinggal terpisah dengan orang tua mereka dan tinggal bersama dengan suami mereka.

Tabel 12. Responden Berdasarkan Kepemilikan Tempat tinggal di Daerah Asal dan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Kepemilikan Tempat Tinggal					Persentase (%)
	Orang Tua	Saudara	Suami	Sendiri	Lainnya	
Kawin	49	2	3	4	0	58
Belum Kawin	39	0	0	0	1	40
Pernah Kawin	2	0	0	0	0	2
Total	90	2	3	4	1	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

3. Lapangan Pekerjaan di Daerah Asal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tenaga kerja perempuan yang pernah bekerja di daerah asal hanya sebanyak 42% responden dan yang belum pernah bekerja sebanyak 58% responden. Dari 42% responden yang pernah bekerja di daerah asal, 23% berstatus menikah dan 19% berstatus belum menikah, sedangkan dari 58% responden yang belum pernah bekerja di daerah asal, 35% berstatus menikah, 21% belum menikah dan 2% lainnya berstatus pernah menikah (lihat Tabel 13).

Tabel 13. Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya Bekerja di Daerah Asal

Status Perkawinan	Bekerja di daerah asal		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	23	35	58
Belum Kawin	19	21	40
Pernah Kawin	0	2	2
Total	42	58	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Jenis pekerjaan responden di daerah asal dari 42% responden yang pernah bekerja di daerah asal 14% diantaranya bekerja sebagai karyawan, 4% sebagai petani dan buruh tani, 3% bekerja sebagai pedagang dan 3% lainnya memiliki pekerjaan lain seperti pembantu rumah tangga (lihat tabel 14).

Tabel 14. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Daerah Asal

Status Perkawinan	Jenis Pekerjaan					Persentase (%)
	Petani	Buruh Tani	Karyawan	Pedagang	Lainnya	
Kawin	1	0	2	2	0	23
Belum Kawin	2	1	12	1	3	19
Pernah Kawin	0	0	0	0	0	0
Total	3	1	14	3	3	42

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Pendapatan dari 42% responden yang pernah bekerja di daerah asal yakni sebanyak 19% responden berpenghasilan dibawah Rp 500.000,00, 13% responden berpenghasilan antara Rp 500.000,00-Rp 1.000.000,00 dan 6% responden lainnya berpenghasilan di atas Rp 1.500.000,00.

Dari pertanyaan sulit tidaknya mendapatkan pekerjaan di daerah asal, sebanyak 22% responden menjawab sulit dan 78% menjawab tidak sulit (lihat tabel 16). Hasil ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan

pekerjaan di daerah asal menurut sebagian besar responden tidak sulit. Sehingga dorongan untuk melakukan mobilitas penduduk responden bukanlah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Namun jika dikaitkan dengan pendapatan di daerah asal yang relatif rendah maka alasan yang paling mungkin adalah adanya pengharapan akan adanya pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.

Tabel 15. Responden Berdasarkan Status Pernikahan dan Pendapatan yang Diperoleh di Daerah Asal

Pendapatan Di Daerah Asal	Status Perkawinan			Persentase (%)
	Kawin	Belum Kawin	Pernah Kawin	
≤ Rp 500.000,00	11	8	0	19
Rp 500.001,00-Rp 1000.000,00	6	7	0	13
Rp 1000.001,00-Rp 1.500.000,00	4	4	0	4
Rp 1.500.001.00-Rp 2000.000,00	1	0	0	1
> Rp 2000.000,00	1	0	0	1
Total	23	19	0	42

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Tabel 16. Responden Berdasarkan Sulit Tidaknya Mencari Pekerjaan di Daerah Asal

Status Perkawinan	Sulit Mencari Pekerjaan		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	14	44	58
Belum Kawin	8	32	40
Pernah Kawin	0	2	2
Total	22	78	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

4.3.2 Faktor Penarik

Selain faktor pendorong di daerah asal yang membuat seseorang memutuskan melakukan mobilitas penduduk, ada faktor lain juga yang turut mempengaruhi keputusan seseorang yakni faktor penarik daerah tujuan. Faktor penarik tersebut antara lain: adanya teman atau sanak family sebagai teman tinggal, kemudahan mencari pekerjaan di daerah tujuan, pendapatan yang lebih tinggi, serta bagaimana kenyamanan di daerah tujuan.

1. Teman Tinggal dan Kepemilikan Tempat Tinggal di Daerah

Tujuan

Teman tinggal responden di daerah tujuan memiliki kaitan erat dengan pilihan untuk melakukan migrasi di daerah tujuan migrasi karena ada kecenderungan seseorang akan melakukan mobilitas penduduk ke tempat dimana di daerah tersebut terdapat sanak saudara atau orang yang dikenal untuk memudahkan proses adaptasi. Menurut teori segregasi (*segregation theory*) yang dikemukakan oleh Hundershot (1970), para migran akan memilih tempat tinggal dimana para tetangga atau teman-teman dari daerah asalnya berada. Mereka berusaha mencari perlindungan dengan memilih bertempat tinggal berdekatan dengan orang-orang yang berasal dari daerah asal sama dan nilai-nilai cultural yang sama. Dengan demikian, adanya orang dari daerah asal yang sama merupakan faktor pelancar bagi masuknya migran ke kota (Mantra,

1989:19). Proses ini biasanya disebut proses migran berantai (*Chain Migration*) dimana migran yang terlebih dahulu datang dan melakukan migrasi ke daerah tujuan membantu migran yang baru datang.

Hasil olah data menunjukkan bahwa 12% responden tinggal dengan saudara, 52% tinggal bersama suami (responden yang menikah), 19% tinggal sendiri, 12 % tinggal bersama teman dan 5% lainnya dengan orang tua (lihat tabel 17).

Tabel 17. Responden Berdasarkan Teman Tinggal di Daerah Tujuan

Status Perkawinan	Teman Tinggal					Persentase (%)
	Saudara	Suami	Sendiri	Teman	Lainnya	
Kawin	3	52	3	0	0	58
Belum Kawin	8	0	15	12	5	40
Pernah Kawin	1	0	1	0	0	2
Total	12	52	19	12	5	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Tabel 18. Kepemilikan Tempat Tinggal di Daerah Tujuan

Status Perkawinan	Kepemilikan Tempat Tinggal					Persentase (%)
	Sewa	Saudara	Teman	Sendiri	Lainnya	
Kawin	32	3	0	20	3	58
Belum Kawin	38	1	0	1	0	40
Pernah Kawin	1	0	0	1	0	2
Total	61	4	0	22	3	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Kepemilikan tempat tinggal responden dari hasil kuisioner yakni, 61% responden menyewa tempat tinggal, 4% milik saudara, 22% milik sendiri dan 3% lainnya milik orang tua (lihat tabel 18). Hasil ini sesuai

dengan kenyataan lapangan bahwa banyak tumbuhnya tempat tinggal yang disewakan di daerah industri. Hal ini terjadi juga akibat biaya membeli rumah yang tinggi atau responden memang tidak berniat menetap, ketersediaan tempat untuk tinggal menjadi nilai positif bagi suatu daerah untuk menjadi tujuan migrasi.

2. Sulit Tidaknya Mendapatkan Pekerjaan di Daerah Tujuan

Dari berbagai teori, kemudahan mencari pekerjaan di daerah tujuan menarik seseorang untuk datang dan memutuskan melakukan migrasi ke suatu daerah. Hasil kuesioner menunjukkan, sebanyak 42% responden mengaku sulit untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi dan 58% responden lainnya menjawab tidak sulit mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi (lihat tabel 19). Hasil ini menunjukkan bahwa lebih banyak responden menjawab tidak sulit mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi walau perbedaan persentase antara yang menjawab sulit dengan tidak sulit tidak signifikan.

Tabel 19. Responden Berdasarkan Sulit Tidaknya Mencari Pekerjaan Di Kabupaten Bekasi

Status Perkawinan	Sulit mencari pekerjaan		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	27	31	58
Belum Kawin	14	26	40
Pernah Kawin	1	1	2
Total	42	58	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

3. Pendapatan Responden di Daerah Tujuan

Pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan dibanding daerah asal menjadi salah satu alasan utama responden melakukan mobilitas penduduk ke daerah tujuan. Hasil olah data menunjukkan bahwa sebanyak 61% responden memperoleh pendapatan antara Rp 1.000.001,00-Rp 1.500.000,00, 16% responden berpendapatan antara Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00, 15% responden berpendapatan antara Rp 500.001,00-Rp 1000.000,00, 4% responden berpendapatan kurang dari Rp 500.000,00 dan 4% responden lainnya berpendapatan lebih dari Rp 2.000.000,00 (lihat tabel 20).

Dari hasil olah data di lapangan, dapat diketahui bahwa sebanyak 81% responden berpenghasilan diatas Rp 1.000.000,00, ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh relatif lebih baik dibandingkan dengan pendapatan di daerah asal, hal ini membuat responden tertarik untuk melakukan mobilitas penduduk ke Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *income* harapan yang diungkapkan oleh Todaro dimana pengharapan akan memperoleh

pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan mendorong orang melakukan mobilitas penduduk.

Tabel 20. Responden Berdasarkan Pendapatan yang Diperoleh di Kabupaten Bekasi

Pendapatan Di Daerah Tujuan	Status Perkawinan			Persentase (%)
	Kawin	Belum Kawin	Pernah Kawin	
≤ Rp 500.000,00	3	1	0	4
Rp 500.001,00-Rp 1000.000,00	13	2	0	15
Rp 1000.001,00-Rp 1.500.000,00	25	35	1	61
Rp 1.500.001,00-Rp 2000.000,00	13	2	1	16
> Rp 2000.000,00	4	0	0	4
Total	58	40	2	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

4. Kenyamanan Tinggal di Kabupaten Bekasi

Kenyamanan tinggal di daerah tujuan bagi migran menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang untuk memutuskan apakah akan melakukan mobilitas penduduk atau tidak. Hasil olah data menunjukkan sebanyak 93% responden merasa nyaman tinggal di Kabupaten Bekasi dan hanya 7% yang merasa tidak nyaman (lihat tabel 21).

Tabel 21. Kenyamanan Responden Tinggal di Kabupaten Bekasi

Status Perkawinan	Kenyamanan Tinggal di Kab. Bekasi		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	56	2	58
Belum Kawin	35	5	40

Pernah Kawin	2	0	2
Total	93	7	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Ini membuktikan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki daya tarik untuk menjadi tempat tinggal bagi responden. Kenyamanan seseorang untuk tinggal di suatu daerah akan ikut menentukan pilihan seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk bahkan dapat menentukan niatan menetap di daerah tujuan.

4.3.3 Faktor Individu

Pengaruh faktor pribadi dalam penentuan keputusan apakah seseorang akan melakukan mobilitas penduduk atau tidak sangatlah besar bahkan lebih besar dibandingkan faktor lain. Faktor-faktor pribadi tersebut antara lain adanya dorongan dari orang lain, dan informasi mengenai daerah tujuan.

1. Pendorong Pindah

Dorongan untuk pindah atau melakukan mobilitas penduduk terkadang dipengaruhi oleh ajakan atau pengaruh dari orang lain, seperti saudara, orang tua, teman dan lainnya atau bahkan dorongan dari diri sendiri. Hasil olah data kuesioner menunjukkan bahwa dorongan untuk pindah para responden yakni 21% datang dari saudara, 24% datang dari suami untuk responden yang menikah, 18% dari orang tua, 11% dari teman dan 26% lainnya menjawab dorongan diri sendiri (lihat tabel 22).

Hal menarik terlihat dari hasil kuesioner tersebut, dimana tidak ada jawaban yang dominan dari para responden yang menunjukkan bahwa dorongan mereka memang datang dari orang terdekat. Satu hal yang paling menarik adalah sebanyak 26% responden menjawab dorongan untuk melakukan migrasi datang dari diri sendiri sehingga ini menunjukkan adanya kemandirian yang lebih dari responden.

Tabel 22. Responden Berdasarkan Pendorong Pindah

Status Perkawinan	Pendorong pindah					Persentase (%)
	Saudara	Suami	Orang Tua	Teman	Lainnya	
Kawin	11	24	5	7	11	58
Belum Kawin	9	0	13	3	15	40
Pernah Kawin	1	0	0	1	0	2
Total	21	24	18	11	26	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

2. Informasi Mengenai Daerah Tujuan

Informasi mengenai daerah tujuan menjadi penting untuk diperhatikan karena informasi yang diperoleh akan membantu seseorang untuk memutuskan melakukan mobilitas penduduk atau tidak. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dari hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 48% responden memperoleh informasi mengenai daerah tujuan dari saudara, 11% responden dari suami, 36% responden dari teman, 7% responden dari media massa dan 8% responden lainnya dari berbagai sumber lain (lihat tabel 23).

Dari jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan responden masih menjadi sumber utama mengenai daerah tujuan dalam hal ini Kabupaten Bekasi. Orang dekat tersebut atau dalam hal ini adalah teman, suami, dan saudara responden telah melakukan migrasi terlebih dahulu ke daerah tujuan.

Tabel 23. Responden Berdasarkan Sumber Informasi Daerah Tujuan

Status Perkawinan	Sumber informasi					Persentase (%)
	Saudara	Suami	Teman	Media	Lainnya	
Kawin	21	11	19	4	3	58
Belum Kawin	26	0	16	3	5	40
Pernah Kawin	1	0	1	0	0	2
Total	48	11	36	7	8	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

3. Alasan Pindah

Alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk dapat berbeda-beda tergantung pribadi seseorang itu sendiri. Alasan yang dikemukakan oleh responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 31% responden karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, 17% responden karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik, 16% responden karena adanya dorongan baik dari orang tua, suami ataupun teman, 32% responden beralasan karena ingin mencari pengalaman dan 2% responden lainnya dengan alasan lain (lihat tabel 24).

Hasil ini menunjukkan bahwa alasan ingin mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik masih menjadi alasan utama sebagian besar responden. Hal ini sesuai dengan teori-teori seperti teori gravitasi Ravenstein maupun Ehrenberg. Namun, ada satu hal yang menarik dimana ada 32% responden beralasan melakukan mobilitas penduduk karena ingin mencari pengalaman.

Tabel 24. Alasan Pindah Responden

Alasan Pindah responden	Status Perkawinan			Persentase (%)
	Kawin	Belum Kawin	Pernah Kawin	
Pekerjaan lebih baik	11	20	0	31
Pendapatan lebih baik	9	7	1	17
Dorongan Orang Tua/Suami/Teman	14	2	0	16
Mencari pengalaman	22	9	1	32
Lainnya	2	1	0	3
Total	58	40	2	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

4.3.4 Faktor Rintangan

Faktor rintangan menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan migrasi. karena faktor hambatan ini membuat seseorang ragu untuk melakukan migrasi bahkan dapat membatalkannya jika hambatan tersebut besar. Faktor-faktor hambatan tersebut seperti biaya transportasi, dan biaya hidup di daerah tujuan.

1. Sarana dan Biaya Transportasi

Sarana transportasi menjadi penting bagi setiap proses mobilitas penduduk, pemilihan alat transportasi ini didasarkan pada biaya, kemudahan untuk menggunakannya, waktu tempuh, keamanan dan kenyamanan alat transportasi tersebut. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 72% responden menggunakan transportasi bus, 5% menggunakan mobil pribadi, 4% menggunakan sarana transportasi berupa kereta api, 15 % menggunakan sepeda motor dan 4% lainnya menggunakan sarana transportasi lain seperti pesawat terbang (lihat tabel 25).

Hasil ini sangat wajar ketika banyak responden yang memilih menggunakan sarana transportasi bus karena memang banyak perusahaan otobus yang menjadikan Bekasi sebagai daerah tujuan. Jika melihat daerah asal responden yang kebanyakan berasal dari kota-kota di Jawa barat dan Jawa Tengah maka pilihan penggunaan bus menjadi wajar. Banyak bus yang melayani rute Kabupaten Bekasi dengan kota-kota di Jawa tengah dan Jawa Barat.

Tabel 25. Sarana Transportasi yang digunakan Responden

Status Perkawinan	Sarana Transportasi					Persentase (%)
	Bus	Mobil pribadi	Kereta Api	Sepeda Motor	Lainnya	
Kawin	37	4	3	11	3	58
Belum Kawin	34	1	1	4	0	40
Pernah Kawin	1	0	0	0	1	2
Total	72	5	4	15	4	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Biaya transportasi sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang memilih daerah tujuan dalam mobilitas penduduk. Hal ini terkait dengan alasan ada tidaknya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki seseorang untuk memenuhi biaya transportasi. Semakin jauh maka biaya yang dibutuhkan tentu semakin besar. Selain itu keputusan migrasi merupakan keputusan logis ekonomis dimana seseorang akan mempertimbangkan *cost* (biaya) dan *benefit* (keuntungan) yang diperoleh. Apabila *cost* lebih tinggi maka ada kemungkinan seseorang akan memutuskan untuk tidak melakukan migrasi atau mencari daerah lain yang *cost*-nya lebih kecil dan mampu dijangkau.

Hasil olah data menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden menghabiskan biaya kurang dari Rp 100.000,00 untuk biaya transportasi, 18% responden menghabiskan antara Rp 100.001,00-Rp 200.000,00, 8% menghabiskan antara Rp 200.001,00-Rp 300.000,00, 2% responden menghabiskan antara Rp 300.001.00-Rp 400.000,00 dan 7% responden lainnya menghabiskan lebih dari Rp 400.000,00 (lihat tabel 26).

Tabel 26. Responden Berdasarkan Biaya Transportasi yang Dikeluarkan

Besaran Biaya Transportasi	Status Perkawinan			Persentase (%)
	Kawin	Belum Kawin	Pernah Kawin	
≤ Rp 100.000,00	39	26	0	65

Rp 100.001,00-Rp 200.000,00	11	6	1	18
Rp 200.001,00-Rp 300.000,00	2	6	0	8
Rp 300.001,00-Rp 400.000,00	2	0	0	2
> Rp 400.000,00	4	2	1	7
Total	58	40	2	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Besaran biaya transportasi tadi tentu akan berbeda artinya bagi tiap orang, terutama dalam hal mahal atau tidaknya biaya transportasi akan berbeda. Hasil kuesioner menunjukkan 70% responden menganggap biaya transportasi yang dihabiskan terbilang mahal dan 30% lainnya menganggap tidak mahal (lihat tabel 27). Hal ini menunjukkan walaupun biaya transportasi tersebut mahal namun responden masih mampu untuk membiayainya, sehingga biaya transportasi tidak menghambat mereka untuk melakukan mobilitas penduduk.

Tabel 27. Responden Berdasarkan Mahal Tidaknya biaya transportasi

Status Perkawinan	Mahal Tidaknya Biaya Transportasi		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	46	12	58
Belum Kawin	23	17	40
Pernah Kawin	1	1	2
Total	70	30	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

2. Biaya Hidup

Biaya hidup di daerah tujuan juga menjadi bahan pertimbangan karena terkait dengan biaya dan keuntungan yang diperoleh di daerah tujuan. Hasil kuisioner menunjukkan 8% responden memiliki pengeluaran dalam sebulan kurang dari Rp 500.000,00, 50% menghabiskan antara Rp 500.001,00-Rp 1000.000,00, 12 % menghabiskan antara Rp 1000.001,00-Rp 1.500.000,00, 21% menghabiskan Rp 1.500.001.00-Rp 2000.000,00 dan 8% lainnya menghabiskan lebih dari Rp 2.000.000,00 setiap bulan (lihat tabel 28).

Tabel 28. Besaran Biaya Hidup Responden di Kabupaten Bekasi

Besaran Biaya Hidup	Status Perkawinan			Persentase (%)
	Kawin	Belum Kawin	Pernah Kawin	
≤ Rp 500.000,00	5	3	0	8
Rp 500.001,00-Rp 1000.000,00	23	27	0	50
Rp 1000.001,00-Rp 1.500.000,00	5	6	1	12
Rp 1.500.001.00-Rp 2000.000,00	19	2	0	21
> Rp 2000.000,00	6	1	1	8
Total	58	40	2	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Besaran biaya hidup ini menjadi relatif bagi tiap orang, tinggi atau tidaknya biaya hidup tergantung persepsi tiap-tiap orang. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dari responden 94% responden merasa bahwa biaya hidup di Kabupaten Bekasi tinggi dan hanya 6% yang menjawab tidak (lihat tabel 29). Akan tetapi jika dilihat antara pendapatan dan pengeluaran nampaknya masih lebih besar

pendapatan walaupun marginnya tidak besar sehingga biaya hidup ini tidak menyurutkan seseorang terutama responden untuk tetap tinggal dan bekerja di Kabupaten Bekasi.

Tabel 29. Responden Berdasarkan Tinggi atau Tidaknya Biaya Hidup Di Kabupaten Bekasi

Status Perkawinan	Biaya Hidup Tinggi		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	55	3	58
Belum Kawin	37	3	40
Pernah Kawin	2	0	2
Total	94	6	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

4.4 Pola Mobilitas Penduduk

Dalam proses mobilitas penduduk tentu ada ciri khas dalam setiap prosesnya, ciri khas inilah yang membentuk sebuah pola. Hal tersebut biasanya terkait dengan niatan seseorang untuk menetap di daerah tujuan, lama menetap dan hubungan langsung dengan daerah asal.

Keinginan seseorang untuk menetap atau tidak menjadi penting untuk membedakan jenis mobilitas atau migrasi yang dilakukan oleh seseorang, bahkan hal ini menjadi penentu utama. Jika seseorang berkeinginan menetap maka dapat

dikatakan dia melakukan mobilitas permanen atau migrasi namun jika tidak memiliki niatan untuk menetap maka seseorang tersebut dikatakan melakukan mobilitas nonpermanen (sirkuler) walau dia sudah lama tinggal di daerah tujuan migrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap keinginan untuk menetap di Kabupaten Bekasi berimbang dimana 54% responden memiliki keinginan menetap dan 46% responden tidak memiliki keinginan untuk menetap (lihat tabel 30). Dengan kata lain pola mobilitas yang dilakukan oleh responden adalah mobilitas permanen dan non permanen. Akan tetapi hal ini dapat diperinci lagi dengan melihat frekuensi responden pulang ke daerah asal.

Tabel 30. Keinginan Menetap Responden

Status Perkawinan	Keinginan menetap		Persentase (%)
	Ya	Tidak	
Kawin	32	26	58
Belum Kawin	12	28	40
Pernah Kawin	2	0	2
Total	46	54	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Biasanya penduduk yang melakukan mobilitas tetap menjaga hubungan yang sangat erat dengan sanak keluarga mereka di daerah asal. Di daerah seseorang lahir, dan sebelum sekolah orang itu hidup di daerah tersebut. Dia tahu benar tentang kondisi lingkungan daerah asal, penuh nostalgia ketika hidup dan berdomisili di daerah asal dan bermain dengan teman-teman sebaya. Itulah sebabnya, seseorang sangat terikat dengan daerah asal. Walaupun sudah berpindah tempat tinggal namun

seseorang akan tetap daerah asal sebagai rumah pertama (Mantra, 2000:236). Dalam hal ini, penduduk yang pindah ke daerah lain mempunyai sifat *bi-local* population; dalam arti walaupun mereka kini sudah bertempat tinggal di daerah lain, tetapi mereka masih menganggap tempat lahirnya sebagai tempat tinggal (Sudibia, 1986:57-58).

Frekuensi responden untuk pulang ke daerah asal berdasarkan hasil kuesioner yakni 8% tidak pernah pulang, 62% pulang ke daerah asal sebanyak 1-2 kali dalam setahun, 20% 3-4 kali, 5% 5-6 kali dan 5% lainnya lebih dari 6 kali dalam setahun (lihat tabel 31). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat *bi-local population* terdapat pada responden sehingga walaupun mereka tinggal di daerah tujuan mereka tetap mengadakan hubungan dengan daerah asal.

Tabel 31. Frekuensi Pulang ke Daerah Asal

Status Perkawinan	Kepemilikan Tempat Tinggal					Persentase (%)
	Tidak Pernah	1-2	3-4	5-6	> 6	
Kawin	6	35	13	1	3	58
Belum Kawin	0	27	7	4	2	40
Pernah kawin	2	0	0	0	0	2
Total	8	62	20	5	5	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2012

Banyaknya responden yang melakukan kunjungan/pulang ke daerah asal antara 1-2 kali dipengaruhi banyak hal namun hal yang utama adalah faktor jarak serta sistem kerja di perusahaan yang memang memberikan kesempatan cuti atau libur di masa tertentu seperti perayaan hari besar. Selain itu asal responden dominan

dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang membutuhkan waktu lama untuk ditempuh selain itu libur kerja yang dimiliki tidak lama.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pola migrasi yang terlihat adalah cenderung pola mobilitas nonpermanen dimana bentuknya sebagian besar adalah mobilitas nonpermanen jangka panjang. Mobilitas nonpermanen jangka panjang adalah mobilitas yang dilakukan oleh seseorang dengan niatan untuk tidak menetap dan kembali ke daerah asal 1-2 kali dalam setahun. Kuatnya ikatan keanggotaan kepada keluarga besar yang berada di desa dan kepada masyarakat pedesaan, dapat membuat bolak-balik ke desa menjadi proporsi yang menarik. Tuntutan yang dibuat oleh orang yang melakukan mobilitas penduduk terhadap sistem perkotaan sangat bervariasi sesuai dengan rencana masa depan mereka. Mereka yang belum menikah harapannya tidak terlalu banyak. Banyak dari pelaku mobilitas penduduk benar-benar menyadari aspirasi mereka untuk pensiun di desa. Mereka yakin sepanjang mereka bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri, suatu hari nanti mereka akan menetap di kampung halaman mereka (Puspitasari, 2010:43).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik responden berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa usia perempuan yang melakukan mobilitas ke Kabupaten Bekasi didominasi oleh perempuan yang berusia antara 20-34 tahun dengan berstatus kawin dan pendidikan responden rerata adalah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Daerah asal responden migran perempuan di dominasi migran yang berasal Jawa Barat dan Banten, serta Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
2. Faktor pendorong responden melakukan mobilitas penduduk dari daerah asal karena faktor psikologis yakni keinginan mandiri dan alasan pendapatan yang rendah di daerah asal. Sedangkan faktor penarik daerah tujuan yakni mencari

pengalaman dan adanya harapan akan pendapatan dan pekerjaan lebih baik serta alasan tempat tinggal yang nyaman. Responden lebih banyak memperoleh informasi daerah tujuan dari sanak saudara dan suami. Namun inisiatif migrasi datang dari responden sendiri. Faktor rintangan transportasi dan biaya hidup tidak menyurutkan niat melakukan mobilitas penduduk. Untuk sarana transportasi yang digunakan adalah bus.

3. Pola mobilitas penduduk yang dilakukan oleh responden yang terlihat adalah cenderung pola mobilitas non permanen dimana bentuknya sebagian besar adalah mobilitas nonpermanen jangka panjang. Mobilitas non permanen jangka panjang adalah mobilitas yang dilakukan oleh seseorang dengan niatan untuk tidak menetap dan kembali ke daerah asal 1-2 kali dalam setahun.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan yakni:

1. Daerah yang memiliki karakteristik penduduk perempuan yang memiliki karakteristik yang sama dengan pelaku mobilitas penduduk di Kabupaten Bekasi perlu mewaspadai hilangnya sumber daya manusia muda yang produktif dari daerahnya jika kebutuhan penduduk perempuan ini tak terpenuhi terutama pekerjaan dan pendapatan yang layak.
2. Daerah yang memiliki faktor pendorong seseorang melakukan mobilitas penduduk seperti dalam penelitian ini perlu mewaspadai meningkatnya

jumlah pelaku mobilitas penduduk yang keluar dari daerah tersebut. Penciptaan lapangan pekerjaan, program wirausaha dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Daerah perekonomian dan pembangunan yang lebih baik dibanding daerah lain seperti kabupaten Bekasi perlu mewaspadaai meningkatnya pelaku mobilitas penduduk ke daerah tersebut.

3. Pola mobilitas yang ada menunjukkan bahwa hubungan dengan daerah asal masih ada walau mereka menetap lama di daerah tujuan bahkan ada keinginan untuk suatu saat kembali ke daerah asal. Hal ini perlu diantisipasi dengan memfasilitasi dalam hal perencanaan pembuatan kawasan pemukiman di daerah tujuan dan perbaikan transportasi untuk memudahkan hubungan dengan daerah asal menjadi lebih baik.